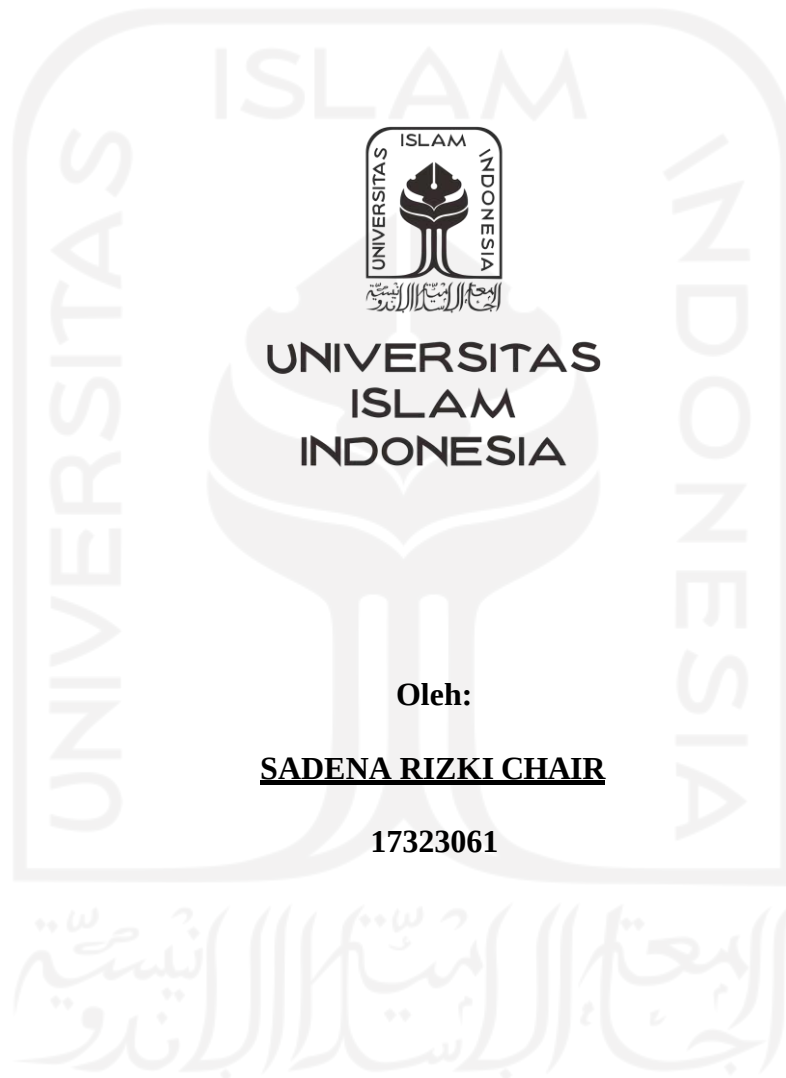


**ANALISIS PELIBATAN AKTOR EKSTERNAL OLEH MILF DALAM
KONFLIK DENGAN PEMERINTAH FILIPINA TAHUN 1997-2017**

SKRIPSI



Oleh:

SADENA RIZKI CHAIR

17323061

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**ANALISIS PELIBATAN AKTOR EKSTERNAL OLEH MILF DALAM
KONFLIK DENGAN PEMERINTAH FILIPINA TAHUN 1997-2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SADENA RIZKI CHAIR

17323061

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Analisis Pelibatan Aktor Eksternal Oleh MILF Dalam Konflik Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1997-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 September 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.

2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

3. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sadena Rizki Chair

No. Mahasiswa : 17323061

Program Studi : Analisis Pelibatan Aktor Eksternal Oleh MILF Dalam Konflik Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1997-2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yang Menyatakan



Sadena Rizki Chair

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Beserta Kedua Adikku

Atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada saya dalam segala hal yang saya lakukan, serta Do'a yang selalu mengiringi perjalanan saya hingga saat ini. Pengorbanan dan perjuangan kalian yang telah menuntun saya hingga saat ini dan seterusnya.

Keluarga Besar

Atas segala dukungan dan Do'a yang selalu diutarakan terhadap penulis.

HALAMAN MOTTO

"Berani berbuat, berani bertanggung jawab. "



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhannahu wa ta'ala yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa untuk selalu diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang sangat besar bagi saya selaku penulis atas rahmat dan hidayah dari Allah yang telah memberikan segala nikmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut membantu memberikan saran, motivasi, bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.PSI., M.Si., Psikologi selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, waktu, dan pemikiran yang diberikan sejak sebelumnya Skripsi ini dibuat, baik siang maupun malam, dan ketika sibuk dan senggang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, aamin yaa Rabbal 'alamiin.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan masukan selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
6. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa
7. Kedua orang tua beserta kedua adik yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan Do'a, dukungan, Kepercayaan dan motivasi untuk penulis dalam setiap keputusan yang penulis buat.
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dengan penuh ikhlas, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021



Sadena Rizki Chair



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
1.5 Cakupan penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Landasan Teori.....	13
1.7.1 Konstruktivisme	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian.....	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II DINAMIKA PERKEMBANGAN KONFLIK MILF DENGAN PEMERINTAH FILIPINA	20
2.1 Terbentuknya Gerakan MILF	20
2.2 Konflik Antara MILF Dengan Pemerintah Filipina.....	23
2.2.1 Periode Pemerintahan Joseph Estrada (1998-2001).....	23
2.2.2 Periode Pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010).....	25

2.2.3 Periode pemerintahan Benigno Aquino III (2010-2016)	28
2.2.4 Periode Pemerintahan Rodrigo Duterte (2016-sekarang).....	29
2.3 Aliansi MILF	30
2.3.1 Al-Qaeda	30
2.3.2 Jamaah Islamiyah	32
2.3.3 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)	34
2.3.4 Malaysia	37
BAB III ANALISIS IDENTITAS, KEPENTINGAN DAN TINDAKAN	
MILF	39
3.1 Identifikasi Identitas MILF	39
3.3.1 Role Identity Sebagai Kategori Identitas Yang Dibentuk Oleh MILF Dalam Aliansinya.....	43
3.2 Analisis Kepentingan MILF	44
3.3 Analisis Tindakan Yang Diambil Oleh MILF Dalam Memperjuangkan Kepentingan Bangsamoro.....	47
3.1.1 Melakukan Tindakan Perlawanan Terhadap Pemerintah Filipina Yang Didukung Oleh Al-Qaeda Dan Jama'ah Islamiyah.....	48
3.3.2 Melakukan Upaya Perundingan Damai Dengan Pemerintah Filipina Yang Didukung Oleh Malaysia Dan OKI	51
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Identitas, Kepentingan dan Tindakan	15
---	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Identitas, Kepentingan dan Tindakan MILF	55
---	-----------



ABSTRAK

Konflik MILF dengan pemerintah Filipina dilatarbelakangi oleh tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Bangsamoro. Pada tahun 1997, pemerintah Filipina yaitu Joseph Estrada mengeluarkan kebijakan all-out war atau perang habis habisan terhadap MILF. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyingkapkan seluruh anggota MILF beserta institusinya. Hal tersebut kemudian mendorong MILF untuk melibatkan aktor eksternal kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. Pelibatan aktor eksternal oleh MILF merupakan langkah atau upaya yang dilakukan oleh MILF untuk dapat melakukan perlawanan terhadap kebijakan all-out war yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina.

Kata kunci : MILF, Pemerintah Filipina, Bangsamoro, diskriminasi, kebijakan, aktor eksternal.

ABSTRACT

The conflict between MILF and Philippine's government was distributed by the discrimination action that was done by Philippine's government towards Moro nation. In 1997, The Philippine's government, Joseph Estrada issued all-out war policy towards MILF. The policy was aimed to eliminate all members and institution of MILF. Those policy drove MILF to involve external actors within the conflict with Philippine's government. This external actors involvement by MILF is the effort to resistance towards the all out war policy that is issued by Philippine's government.

Key Words : MILF, Philippine's government, Moro nation, discrimination, policy, external actors

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mindanao merupakan salah satu wilayah yang ada dibagian selatan Filipina yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Masyarakat yang beragama Islam di Mindanao dikenal dengan sebutan Bangsamoro. Istilah Moro sendiri merupakan istilah yang dibawa oleh penjajah Spanyol yang ada di Filipina pada masa penjajahan. Sebutan Moro di Spanyol ditujukan terhadap orang-orang yang beragama Islam yang datang dan menaklukkan Spanyol pada abad terdahulu (Susetyo 2009). Istilah Moro di Filipina bukan ditujukan untuk etnis atau ras tertentu tetapi kata Moro digunakan terhadap masyarakat Filipina khususnya Kawasan Mindanao yang beragama Islam. Ajaran Islam sendiri pertama kali masuk di Mindanao pada tahun 1380 M yang dibawa oleh seorang ulama dari Arab yang bernama Karimul Makhdun atau lebih dikenal dengan nama Syekh Makhdun (Hasaruddin 2019).

Pada awal abad ke 16, Spanyol datang ke Filipina dengan membawa tujuan untuk mendirikan daerah jajahan dan misi untuk melakukan *Kristenisasi* terhadap orang-orang Islam Filipina. Konflik Islam dan Kristen yang ada di Filipina dimulai dari sini, yaitu ketika misi *Kristenisasi* Spanyol ditentang oleh orang-orang Islam yang ada di Mindanao. Perang antara Islam dan Kristen tidak bisa terhindarkan. Tragedi tersebut dikenal dengan nama *Perang Moro*, dari situ muncul definisi negatif untuk menafsirkan kata *Moro*. *Moro* mulai dianggap

sebagai orang atau sekelompok orang yang bodoh, kasar, dan tidak berpendidikan. Kata *Moro* tersebut tentu ditujukan terhadap orang Islam, sedangkan untuk orang Kristen Filipina disebut dengan sebutan *Indio* (Berutu 2019). Perang Moro menjadi memori kelam yang dialami oleh orang-orang Islam di Mindanao. Mulai dari peristiwa tersebut orang Islam Mindanao menjadikan orang Kristen Filipina sebagai musuh Islam yang abadi.

Pasca kekalahan Spanyol atas Amerika Serikat pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina terhadap Amerika Serikat. Mindanao juga ikut dalam penyerahan tersebut walaupun Mindanao bukanlah merupakan daerah yang dikuasai oleh Spanyol (Berutu 2019). Akibat hal tersebut, konflik pun terjadi antara Amerika Serikat dengan masyarakat Mindanao yang tidak terima dengan penyerahan yang dilakukan oleh Spanyol. Mereka menganggap bahwasanya mereka bukan daerah koloni Spanyol, dan Spanyol tidak berhasil dalam hal menaklukkan wilayah Mindanao. Seiring berjalannya waktu, konflik Amerika Serikat dengan masyarakat Mindanao berakhir dengan dibuatnya perjanjian antara Amerika Serikat dan Sultan Mindanao pada tahun 1899. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama *Treaty Bates* (Berutu 2019). Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat mengingkari isi perjanjian tersebut dengan menghapuskan kesultanan Mindanao dan memasukan daerah Mindanao ke dalam pembentukan Filipina.

Sebelum kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, Bangsa Moro menyampaikan suatu hal dalam Memorandum Mindanao dan Sulu yaitu rasa kecewa Bangsa Moro terhadap perlakuan pengkhianatan yang dilakukan oleh

Amerika Serikat, dan Bangsamoro juga menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia untuk dimasukan kedalam kemerdekaan Filipina (Islam 2005). Hal tersebut dikarenakan Bangsamoro tidak ingin memberikan wilayahnya kepada yang bukan merupakan Bangsamoro itu sendiri. Bangsamoro memiliki pandangan bahwa tidak pantas apabila didalam satu negara ada dua pihak yang saling bermusuhan. Bangsamoro sendiri telah menganggap orang Kristen Filipina sebagai musuh Islam yang abadi.

Berstatus sebagai kaum minoritas di Filipina, orang Islam Mindanao banyak mendapatkan perlakuan yang *Diskriminasi* dan *Marjinalisasi* dari pemerintah Filipina. Perlakuan yang di terima oleh orang Islam Mindanao yaitu seperti sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan bahkan mendapatkan perlakuan *Diskriminasi* yang bersifat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Militer Filipina (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Sehingga pada tahun 1960an mulai muncul gerakan-gerakan separatis Muslim untuk memperjuangkan hak-hak yang mereka sebagai warga negara yang tidak didapatkan dari pemerintah Filipina. Gerakan-gerakan tersebut dibangun oleh sekelompok Mahasiswa dan para Intelektual (Gershman 2003).

Memasuki awal tahun 1970an, etnis Visayas yang didukung oleh pemerintah Filipina melakukan suatu aksi *Imigrasi* ke daerah selatan Filipina. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan politik *Genocide* terhadap masyarakat Mindanao (Firmanzah 2017). Etnis Visayas memandang bahwa masyarakat Mindanao sebagai suatu masyarakat yang tidak berakal, kasar, dan sering kali melakukan tindakan kekerasan. Hal tersebut kemudian menjadikan masyarakat

Mindanao memiliki pandangan yang buruk terhadap etnis Visayas. Masyarakat Mindanao memandang etnis Visayas beserta pemerintah Filipina sebagai suatu kelompok *Penginjl*. Sikap yang ditunjukkan oleh etnis Visayas dan pemerintah Filipina dianggap telah menodai nilai keberagaman yang ada di Filipina. Selain itu, tindakan yang dilakukan juga dianggap sebagai suatu tindakan yang mengingatkan kembali terhadap rezim yang pernah diterapkan Spanyol di Filipina (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017).

Pemerintah Filipina memiliki suatu ambisi untuk menghilangkan identitas yang ada di Bangsamoro dengan dua hal. Pertama, yaitu dengan melanjutkan misi kolonial terdahulu (Spanyol dan Amerika Serikat) melakukan *Kristenisasi* terhadap masyarakat Mindanao. Kedua, yaitu dengan membuat program *Imigrasi* besar besaran masyarakat Filipina dari bagian utara ke bagian selatan (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengasimilasi masyarakat Moro Mindanao ke dalam masyarakat Filipina dan untuk menghilangkan perbedaan yang ada didalam Filipina itu sendiri. Program *Imigrasi* ini banyak mendapatkan kecaman dari masyarakat Filipina selatan khususnya masyarakat Mindanao yang tanah tempat tinggalnya diambil alih oleh para imigran. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Mindanao merasa mereka tidak dianggap sebagai masyarakat asli yang sudah dari dulu mendiami wilayah kawasan Mindanao. Kekecewaan Bangsamoro terhadap perlakuan pemerintah tersebut telah menimbulkan rasa kebencian Bangsamoro terhadap pemerintah Filipina itu sendiri. Akibat hal tersebut mulai muncul pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan separatis yang ada di Mindanao. Salah satunya

yaitu *Moro Islamic Liberation Front* atau yang lebih dikenal dengan sebutan MILF.

Pada tahun 1976, pemerintah Filipina yaitu Ferdinand Marcos melakukan suatu kampanye untuk dapat meredakan konflik dengan Bangsamoro. Kampanye tersebut menyatakan bahwa pemerintah Filipina akan melakukan pembangunan ekonomi Filipina diberbagai sektor yang terdampak oleh pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan separatis, serta di bangunnya tempat ibadah bagi umat Islam diberbagai kota yang ada di Filipina, dan yang terakhir di akuiya libur hari raya umat Islam (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Kampanye tersebut menghasilkan suatu perjanjian antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina yang dikenal dengan nama *Perjanjian Tripoli*. Inti dari perjanjian tersebut yaitu menjamin prinsip dasar otonomi Islam yang ada di Filipina Selatan dan pembentukan *Autonomous Region in Muslim Mindanao* (ARMM). Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat terwujud dikarenakan sikap pemerintah Filipina yang tidak konsisten. Pemerintah Filipina menganggap perjanjian tersebut melanggar Konstitusi 1973 yang mengatur tentang subdivisi teritorial dan politik Filipina. Sikap pemerintah tersebut membuat Bangsamoro menyatakan perlawanan terhadap pemerintah.

Pada tahun 1984 *Moro Islamic Liberation Front* resmi didirikan oleh Salamat Hasim. MILF sendiri merupakan perpecahan dari MNLF dan Salamat Hasim merupakan mantan wakil ketua dari gerakan MNLF. Gerakan MILF dikenal sebagai salah satu gerakan separatisme terbesar dan paling berpengaruh di Kawasan Mindanao. Gerakan ini memiliki ambisi untuk dapat memperoleh

kembali kemerdekaan yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina. MILF telah mendirikan kurang lebih 46 *camp mujahidin* dan memiliki sekitar 120.000 prajurit bersenjata maupun tidak bersenjata yang terorganisir. Tantara MILF di kenal dengan sebutan *Bangsamoro Islamic Armed Forces* (BIAF). MILF juga dikenal sebagai suatu kelompok atau gerakan yang paling banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat Mindanao dibandingkan kelompok lainnya seperti MNLF, Abu-Sayyaf, dan MIM (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Hal tersebut dikarenakan MILF merupakan satu satunya gerakan yang berideologikan Islam murni, beda halnya dengan MNLF yang berideologikan *Nasionalis-Sekuler* (Nasir 2019).

Rasa ketidakpuasaan terhadap kegagalan *Perjanjian Tripoli* menjadi awal munculnya konflik didalam MNLF. Perbedaan pandangan terkait metode perjuangan antara Salamat Hasyim dan Nur Misuari menjadi titik awal terbentuknya gerakan. Berdirinya MILF sebagai salah satu Gerakan perjuangan Bangsamoro menjadi ancaman tersendiri terhadap pemerintah Filipina. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Filipina menduga adanya keterlibatan kelompok terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah dalam setiap aksi perlawanan yang di lakukan oleh MILF. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama yang terjalin antara MILF dan Al-Qaeda. Kerjasama tersebut berupa pemberian dana dan persenjataan oleh Al-Qaeda dalam melakukan perlawanan melawan pemerintah Filipina. Di sisi lain camp pelatihan yang ada di daerah MILF di gunakan sebagai tempat latihan militer oleh Al-Qaeda (Rafiq 2017). Konflik yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina juga telah banyak melibatkan actor eksternal diantara nya OKI dan Malaysia. OKI dan Malaysia

memiliki peran yang sama dalam hal ini yaitu mengupayakan adanya perdamaian antara MILF dengan pemerintah Filipina.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait perjuangan MILF dalam konflik dengan pemerintah Filipina. Menjabarkan latar belakang permasalahan dan menguraikan aksi-aksi perlawanan dan upaya perundingan yang melibatkan para aktor eksternal akan menjadi focus didalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa MILF melibatkan aktor eksternal dalam konflik dengan pemerintah Filipina tahun 1997-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengapa MILF melibatkan aktor eksternal dalam konflik dengan pemerintah Filipina tahun 1997-2017.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait upaya dan strategi MILF dalam melakukan perlawanan atau perjuangan untuk mendapatkan hak Bangsamoro kembali yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina. Hal tersebut dilakukan dengan cara melibatkan aktor eksternal ke dalam konflik dengan pemerintah Filipina. Seperti contohnya Malaysia yang telah terlibat dalam konflik MILF dengan pemerintah Filipina sejak tahun 2003. Selain itu juga adanya peran Al-Qaeda di dalam konflik tersebut, dimana Al-Qaeda

berstatus sebagai penyokong dana dan persenjataan untuk MILF dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Penelitian ini perlu dilakukan karena belum banyak peneliti yang membahas akan hal tersebut. Penulis ingin agar penelitian ini nantinya bisa menjelaskan bahwasanya gerakan MILF bukanlah merupakan gerakan pemberontak atau gerakan radikal akan tetapi sebagai suatu gerakan yang memperjuangkan hak-hak Bangsamoro dengan menggunakan metode perundingan.

1.5 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan difokuskan terhadap upaya dan strategi yang dilakukan oleh MILF untuk memperjuangkan hak Bangsamoro yang ada di Mindanao. Penulis juga nantinya akan memaparkan pelibatan aktor eksternal oleh MILF kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. Aktor eksternal yang terlibat kedalam konflik seperti OKI, Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah, dan Malaysia. Kemudian peran aktor akan dibagi menjadi 2 hal yaitu aktor sebagai pendukung perlawanan atau perjuangan terhadap pemerintah dan aktor yang mendukung terwujudnya perundingan damai antara MILF dengan pemerintah Filipina. Penulis akan mulai dari tahun 1997, dimana pada saat itu intensitas konflik antara MILF dan pemerintah Filipina sedang meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Filipina yaitu Joseph Estrada mengeluarkan suatu kebijakan all-out war atau perang habis-habisan terhadap MILF. Kemudian hal tersebut membuat MILF untuk mencari bantuan dari aktor eksternal seperti Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah, dan OKI. Penulis memfokuskan untuk mengakhiri penelitian di tahun 2017, dikarenakan ditahun tersebut intensitas konflik dan keterlibatan

para aktor eksternal seperti Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah sudah mulai menurun. Penurunan intensitas konflik tersebut didukung oleh terjadinya Kerjasama antara MILF dan pemerintah Filipina dalam melawan dan menentang kehadiran ISIS di Filipina (Sandria 2018).

1.6 Tinjauan Pustaka

Status sebagai masyarakat yang minoritas menjadikan orang Islam Mindanao atau yang lebih dikenal dengan Bangsamoro mendapatkan perlakuan yang *diskrimintaif* dan *marjinalisasi* dari pemerintah Filipina. Permasalahan minoritas Islam yang ada disuatu negara bukan hanya di asakan oleh masyarakat Mindanao tetapi ada juga beberapa negara yang mengalami permasalahan yang sama seperti masyarakat Rohingya yang ada di Myanmar, masyarakat Uighur yang ada di Tiongkok, dan masyarakat Pattani yang ada di Thailand. Sikap pemerintah Filipina yang mengabaikan aspirasi orang Islam yang ada di Mindanao menjadikan MILF harus mengambil tindakan seperti melakukan pemberontakan. Hal tersebut dilakukan semata mata untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Filipina dan agar aspirasi yang mereka sampaikan dapat didengar oleh pemerintah Filipina. Penulis akan mencoba menganalisa beberapa literatur yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menjawab rumusan masalah yang ada didalam penelitian.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Dr. Hassaruddin, M.Ag dengan judul "*Perkembangan Sosial Islam di Filipina*". Dalam jurnal tersebut di jelaskan bagaimana awal masuknya Islam ke daratan Filipina dan bagaimana perkembangan Islam di Filipina. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Islam masuk

ke Filipina pada tahun 1380 M yang di bawa oleh ulama Arab yang berdagang ke Filipina yaitu Syeikh Makhdun (Karimul Makhdun). Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di Filipina khususnya bagian selatan Filipina (Mindanao). Kedatangan kolonial Spanyol ke Filipina lantas menjadi pemicu kemunduran Islam yang ada di Filipina, karena kolonial Spanyol yang ada di Filipina pada masa itu memiliki misi untuk melakukan *Kristenisasi* terhadap masyarakat pri bumi Filipina (Hasaruddin 2019).

Ada tiga fase perkembangan muslim di Filipina yang di jelaskan di dalam jurnal. Fase pertama yaitu perjuangan melawan Spanyol (1521-1898), fase kedua yaitu perjuangan melawan Amerika Serikat (1898-1946), dan fase yang terakhir yaitu perjuangan melawan pemerintah Filipina (1970-sekarang).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ali Geno Berutu dengan judul “*Sea Muslim Minoritas: South Thailand/Pattani, South Philippines/Mindanao and Thailand*”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana perlakuan pemerintah terhadap minoritas Muslim yang ada di Thailand dan Filipina. Sama halnya dengan Filipina, di Thailand Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh orang Arab. Muslim di Thailand menjadi minoritas, karena kebanyakan masyarakat Thailand menganut ajaran Budha. Perlakuan *diskrimanitif* merupakan hal yang paling sering dirasakan oleh kaum minoritas Muslim di Thailand. Hal tersebut tidak jauh beda dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Mindanao Filipina.

Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pada kisaran tahun 2004-2007 telah memakan 2000 korban lebih akibat pertikaian antara pemerintah Thailand dengan masyarakat minoritas muslim di Thailand bagian selatan. Pemberontakan sering terjadi akibat sikap pemerintah Thailand yang tidak ingin mendengar aspirasi dari

kaum minoritas muslim Pattani (Berutu 2019). Hal tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Filipina. sikap pemerintah yang tidak mau mendengar aspirasi dari orang Islam menjadi pemicu munculnya berbagai gerakan separatis yang melakukan pemberontakan. Jurnal tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi yang di alami oleh orang Islam yang berada di negara yang mayoritasnya non-Muslim.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Aunur Rafiq MS dengan judul *“Kebijakan Pemerintah Filipina Dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front”*. Jurnal ini memaparkan bahwasanya MILF merupakan salah satu gerakan yang sangat menentang keras akan perlakuan pemerintah Filipina yang melakukan aksi *imigrasi* dari utara ke selatan. Aksi tersebut telah mengakibatkan Bangsamoro kehilangan lahan pemukiman mereka akibat adanya program imigrasi tersebut. Hal tersebut memicu terjadinya perlawanan oleh kelompok MILF. MILF sendiri dikenal sebagai kelompok atau gerakan separatis terbesar dan paling berpengaruh di Kawasan Mindanao. Pemerintah Filipina menduga adanya kerja sama yang terjalin antara Al-Qaeda dengan kelompok MILF. Hal tersebut di buktikan dengan adanya bantuan dana dan persenjataan yang di berikan oleh Al-Qaeda terhadap kelompok MILF.

jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok MILF ialah konflik yang melibatkan masalah identitas. Konflik tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Filipina memiliki identitas sebagai sebuah negara sedangkan MILF memiliki identitas sebagai kelompok atau gerakan separatis. Pemerintah Filipina mempertahankan identitasnya sebagai suatu negara untuk dapat mempertahankan wilayah dan

kedaulatan nya, dan MILF berusaha untuk mencapai identitas nya sebagai suatu negara Islam yang merdeka (Rafiq 2017). Perbedaan identitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa konflik antara MILF dan pemerintah Filipina tidak mudah untuk diselesaikan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Yolanda Tandio, Idin Fasisaka, Ni Wayan Rainy Priadarsini dengan judul *“Faktor Pendorong Moro Islamic Liberation Front (MILF) Untuk Menandatangani Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) Dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012”*. Isi dari jurnal tersebut menjelaskan beberapa factor penting yang mendorong kelompok MILF untuk mau menandatangani FAB tersebut yaitu terkait dengan isi yang tercantum di dalam FAB itu sendiri. Isi dari FAB tersebut yaitu adanya pengakuan Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik baru yang di beri nama “Bangsamoro” dan adanya perumusan Undang-Undang Dasar Bangsamoro yang akan menjadi dasar hukum bagi Bangsamoro serta didalamnya juga terdapat pemberian otonomi khusus bagi Bangsamoro.

Jurnal tersebut juga menjelaskan bagaimana peran Malaysia dalam menengahi konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina. Mohagher Iqbal yang bertindak selaku ketua panel perdamaian MILF mencoba untuk memberikan suatu draft perjanjian yang berisi tentang pendirian semacam negara bagian seperti yang ada di Amerika Serikat, akan tetapi tidak sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat. Draft tersebut menjadi alat untuk dapat meredam konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina dan menjadi pemicu di buka nya dialog damai antar keduanya.

Berdasarkan beberapa literatur yang telah dipaparkan diatas bisa dilihat semuanya itu berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Konflik tersebut memunculkan suatu kelompok atau gerakan separatis yang di kenal dengan nama MILF. Selain itu beberapa literatur diatas juga membahas terkait peran aktor eksternal dalam konflik MILF dengan pemerintah Filipina. Hal tersebut akan dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini yaitu terkait “Mengapa MILF melibatkan aktor eksternal dalam konflik dengan pemerintah Filipina tahun 1997-2017?”.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk memberikan gambaran yang berbeda dengan beberapa literatur diatas. Penelitian ini nanti akan membahas terkait pelibatan aktor eksternal oleh MILF kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. Pelibatan aktor eksternal didalam konflik ini akan lebih di jabarkan secara detail. Rangkaian peristiwa yang terjadi seperti penyerangan juga akan dipaparkan didalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memahami alasan pelibatan para aktor eksternal beserta perannya didalam konflik.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konstruktivisme

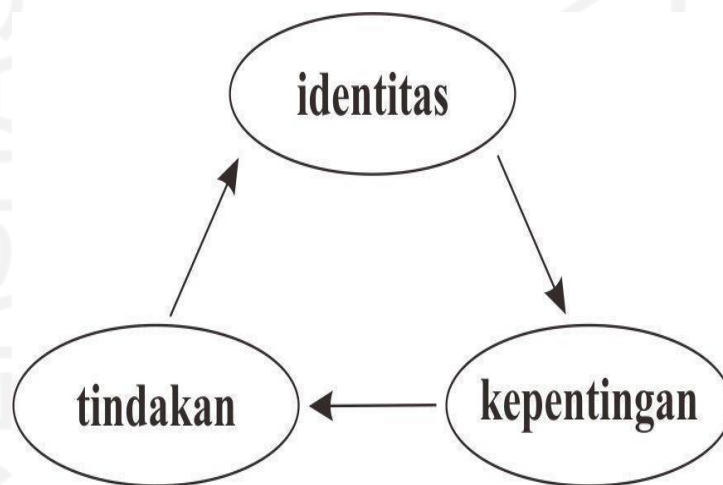
Konstruktivisme muncul sebagai pembaharuan terhadap teori sebelumnya yaitu *realisme* dan *liberalism*. *Konstruktivisme* merupakan teori social yang dikembangkan didalam studi sosiologi. Dalam studi hubungan internasional, *konstruktivisme* hadir pasca perang dingin. Hal tersebut dikarenakan ketidakpuasaan para tokoh *konstruktivis* dalam melihat *realisme* dan *liberalism*

menjelaskan fenomena yang terjadi hanya bersifat *material*. Salah satu pemikir atau tokoh *konstruktivisme* yaitu Alexander Wendt. Alexander Wendt menjelaskan asumsi dasar dari *konstruktivisme* yaitu “*dimensi gagasan* lebih penting dari pada *dimensi material*, dan bahwa identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan tersebut dari pada seperti apa adanya” (Wendt 1999).

Salah satu konsep yang penting didalam *konstruktivisme* untuk dapat memahami tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional yaitu konsep identitas. Konsep identitas pada dasarnya merupakan konsep yang dikembangkan didalam studi sosiologi dan psikologi sosial. Konsep identitas dapat dipahami melalui dua pemaknaan. Pertama, identitas sebagai kategori “sosial” yaitu atribut atau karakteristik aktor yang membedakannya dengan yang lain. Kedua, identitas sebagai kategori “personal” yaitu atribut atau karakteristik yang ada atau melekat pada diri aktor yang keberadaannya muncul tanpa memerlukan proses pembedaan dari yang lain (Rosyidin 2014).

Identitas merupakan dasar dari kepentingan, yang mana kepentingan tersebut akan menentukan arah perilaku atau tindakan suatu aktor. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kepentingan aktor terbentuk sesuai dengan identitas aktor itu sendiri. Kemudian identitas aktor terbentuk akibat adanya gagasan bersama didalam suatu aktor. Hal tersebut berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Alexander Wendt bahwa “identitas dan kepentingan aktor dibangun oleh gagasan atau ide-ide bersama dari pada dibangun secara alami” (Wendt 1999). Selain itu Alexander Wendt juga menjelaskan bahwa identitas adalah prasyarat untuk kepentingan, karena suatu aktor tidak dapat mengetahui apa yang diinginkan nya hingga aktor tersebut mengetahui siapa dirinya.

Alexander Wendt mendefinisikan identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt 1999). Hubungan antara identitas dengan tindakan merupakan hubungan yang saling membentuk satu sama lain (*mutually constituted*). Dalam artian yaitu identitas dapat menentukan tindakan suatu aktor, begitu juga sebaliknya tindakan dapat membentuk identitas dari aktor itu sendiri (Rosyidin 2014).



Gambar 1. Hubungan Identitas, Kepentingan dan Tindakan

Alexander Wendt mengkategorikan identitas menjadi empat kategori, yaitu identitas personal (*corporate identity*), identitas golongan (*type identity*), identitas peran (*role identity*), dan identitas kolektif (*collective identity*) (Wendt 1999).

1. Identitas personal (*corporate identitas*) yaitu identitas suatu actor terbentuk secara alamiah. Identitas ini di bentuk oleh struktur yang mengatur dirinya sendiri dan dapat membedakan dirinya dari actor yang lain.
2. Identitas golongan (*type identity*) yaitu identitas yang dapat terbentuk antara actor yang satu dengan actor yang lain memiliki

karakteristik yang sama atau serupa dalam hal ideologi (agama), budaya, sikap dan perilaku, persepsi, pengalaman sejarah, dan lain lain.

3. Identitas peran (*role identity*) yaitu suatu identitas yang menentukan posisi aktor dalam dunia internasional. Identitas ini terbentuk apabila aktor yang satu dengan aktor yang lain menjalin suatu hubungan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dari salah satu aktor. Sehingga posisi dari aktor tersebut bisa terlihat didalam dunia internasional.
4. Identitas kolektif (*collective identity*) yaitu sekumpulan aktor yang memiliki hubungan dan tergabung didalam suatu identitas. Identitas ini terbentuk karena adanya rasa ketergantungan dan solidaritas antara aktor yang satu dengan aktor yang lain. Ada tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas kolektif, yaitu faktor interaksi antar negara, faktor intersubjektivitas antar negara, faktor komunikasi antar negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk dapat membantu penulis dalam hal menjawab rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian. Penelitian kualitatif akan digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisa berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian kualitatif sangat berfokus terhadap proses,

peristiwa dan otentisitas. Secara metodologis, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengutamakan penggunaan *logika indukatif* yang dapat menghasilkan kategorisasi dari data data yang ada atau dari percakapan antara peneliti dengan informan. Penelitian kualitatif memiliki suatu ciri khas yaitu ikatan konteks yang akan menggiring pada pola pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Creswell 1994).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini akan berfokus terhadap konflik yang terjadi antara kelompok MILF dengan pemerintah Filipina. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan latar belakang munculnya konflik antara kedua belah pihak dan akan menguraikan kejadian kejadian yang terjadi selama konflik berlangsung. Adapun objek didalam penelitian ini yaitu terkait pelibatan aktor eksternal oleh MILF kedalam konflik dengan pemerintah Filipina.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan *Studi Literatur*. *Studi literatur* yaitu dengan menelusuri bebabagai dokumen yang terdapat di dalam buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang ada didalam penelitian (Corbin, 1998). Hal tersebut akan memudahkan penulis dalam hal menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang bersifat *sekunder*. Data *sekunder* yaitu suatu data yang dapat diperoleh melalui tulisan seperti buku, jurnal, dan artikel.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan proses analisis. Proses analisis dilakukan setelah melakukan *studi literatur* dalam hal pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam terkait data yang telah dikumpulkan, agar data tersebut relevan dengan apa yang menjadi pembahasan didalam penelitian. Proses analisis dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan didalam penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis telah membagi kedalam empat point pembahasan. Pertama, yaitu BAB I membahas latar belakang terkait masalah yang ada didalam penelitian ini dan juga membahas tentang gambaran secara umum terkait dengan penelitian ini. Kedua, yaitu BAB II diawali dengan membahas awal terbentuknya Gerakan MILF. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan konflik yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina. Selanjutnya yaitu membahas terkait aliansi MILF dengan organisasi internasional dan negara Islam. Ketiga, yaitu BAB III membahas analisis terkait identifikasi identitas MILF, kepentingan apa yang di bawa oleh MILF didalam konflik dengan pemerintah Filipina, dan tindakan yang dilakukan oleh MILF sebagai upaya perjuangan dalam mengembalikan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. Keempat atau yang

terakhir, yaitu BAB IV bahasan terkait kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya.



BAB II

DINAMIKA PERKEMBANGAN KONFLIK MILF DENGAN PEMERINTAH FILIPINA

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan berupaya untuk menjelaskan permasalahan atau konflik yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina. Pada bab ini juga, penulis akan mencoba untuk menguraikan proses terbentuknya gerakan MILF, apa tujuan dari dibentuknya gerakan tersebut, dan apa yang membedakannya dari gerakan lain yang sudah ada di Mindanao sebelum adanya MILF. Penulis juga akan menguraikan kejadian kejadian yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina seperti perlawanan, pemberontakan, dan perundingan damai.

Kemudian, penulis juga akan mencoba untuk menjelaskan terkait aliansi MILF dengan organisasi internasional atau negara yang terlibat didalam konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina. Penulis akan menguraikan sejarah terbentuknya aliansi, bentuk kerjasama apa yang dilakukan dengan MILF, dan perkembangan dari hubungan MILF dengan organisasi internasional atau negara negara yang terlibat didalam konflik dengan pemerintah Filipina.

2.1 Terbentuknya Gerakan MILF

Moro Islamic Liberation Front atau yang lebih dikenal dengan sebutan MILF merupakan salah satu gerakan separatis terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Mindanao Filipina Selatan (Rafiq 2017). MILF disebut sebagai Gerakan separatis karena berbagai aksi dan tindakan yang dilakukan. Gerakan MILF merupakan pecahan dari Gerakan sebelumnya yaitu MNLF. Kedua Gerakan ini

memiliki kesamaan yaitu sama sama memperjuangkan hak-hak Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina.

MILF pertama kali resmi didirikan pada tahun 1984, yang pada saat itu diketuai oleh Salamat Hasim. Salamat Hasim sendiri merupakan mantan wakil ketua dari Gerakan MNLF (Samosir 2016). Kemunculan MILF tidak terlepas dari peristiwa penghianatan pemerintah Filipina terhadap perjanjian *Tripoli*. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan perpecahan yang terjadi didalam MNLF yaitu keluarnya Salamat Hasim dari Gerakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pandangan antara Salamat Hasim dengan Nur Misuari yang menjadi ketua MNLF pada saat itu (Samosir 2016). Salamat Hasim beranggapan bahwa Nur Misuari tidak merepresentasikan nilai nilai Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsamoro dari pemerintah Filipina.

MILF dikenal sebagai Gerakan separatis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman didalamnya. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai upaya damai yang dilakukan MILF terhadap pemerintah Filipina (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Akan tetapi sifat pemerintah yang mengabaikan aspirasi MILF menjadi pemicu munculnya pemberontakan ataupun perlawanan yang dilakukan oleh MILF. Berbagai aksi atau tindakan yang dilakukan oleh MILF ditujukan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Filipina dan agar aspirasi yang disampaikan oleh MILF dapat didengar oleh pemerintah Filipina (Berutu 2019). Mohagher Iqbal selaku ketua panel perdamaian MILF memaparkan terkait factor yang mendorong MILF melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina yaitu hilangnya hak kebebasan beragama bagi Bangsamoro oleh pemerintah Filipina atau yang lebih di kenal dengan nama misi kristenisasi. Kemudian perampasan

lahan pemukiman Bangsamoro yang dilakukan oleh pemerintah Filipina atau yang dikenal dengan istilah program imigrasi. Kemudian yang terakhir yaitu tindakan genosida pemerintah Filipina terhadap Bangsamoro (Taya 2007).

Terdapat tiga poin penting dalam tujuan didirikannya Gerakan MILF. Pertama, untuk memperjuangkan kemerdekaan Bangsamoro dari pemerintah Filipina. Kedua, untuk mendirikan negara dan pemerintahan yang berbasis Islam. Ketiga, menjadikan firman Tuhan (Allah) sebagai aturan yang tertinggi dalam mengatur aspek kehidupan bagi Bangsamoro (Taya 2007). Tujuan tersebut menjadikan MILF sebagai salah satu Gerakan yang paling berpengaruh di daerah Filipina bagian selatan. Menjadikan Islam sebagai tujuan perjuangan dalam kemerdekaan telah memberikan perbedaan antara MILF dengan Gerakan lainnya yang ada di Filipina bagian selatan. Selain itu, MILF juga dianggap lebih representatif dalam memperjuangkan kepentingan Bangsamoro dibandingkan Gerakan lainnya. MILF diketahui memiliki anggota kurang lebih sekitar 120.000 orang, yang didalamnya termasuk anggota bersenjata maupun tidak bersenjata. Tantara MILF dikenal dengan sebutan *Bangsamoro Islamic Armed Force* (BIAF). MILF juga memiliki 46 camp mujahidin yang tersebar diseluruh Kawasan Mindanao (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017).

Berstatus sebagai salah satu Gerakan yang merepresentasikan kepentingan Bangsamoro, menjadikan MILF sebagai Gerakan yang paling berpengaruh dan terbesar di Kawasan Mindanao. Hal tersebut dibuktikan dengan keanggotaan MILF yang sudah mulai menyebar disetiap penjuru Kawasan Mindanao. Hal tersebut juga tidak terlepas dari ideologi yang dianut oleh MILF itu sendiri yaitu ideologi Islam murni (Nasir 2019). MILF menjadikan aturan Islam sebagai acuan

dalam mengatur segala bentuk aspek kehidupan. Salah satu contoh nya yaitu MILF menjadikan ajaran Islam sebagai landasan atau dasar hukum peradilan MILF dalam mengatur daerah yang masuk kedalam kendali MILF itu sendiri. MILF juga mendirikan *Internal Security Force* (ISF) untuk dapat menjaga ketertiban dan menegakkan ajaran Islam di Kawasan yang berada dibawah kendali MILF (Wilson Jr. 2009).

2.2 Konflik Antara MILF Dengan Pemerintah Filipina

Memasuki tahun 1996, pemerintah Filipina dan MNLF melakukan suatu perjanjian damai yang di kenal dengan nama *Final Peace Agreement*. Hasil dari perjanjian tersebut menjadikan Nur Misuari sebagai gubernur baru ARMM yang mendapat dukungan dari pemerintah Filipina. MILF memandang hal tersebut hanya untuk kepentingan Nur Misuari semata, oleh karena itu MILF mulai melakukan tindakan dengan mengambil alih sebagian anggota MNLF untuk masuk ke tubuh MILF. Hal tersebut di lakukan untuk menjadikan MILF sebagai kekuatan militan Moro yang dominan di Kawasan Mindanao (Bale 2015). Melihat tindakan yang dilakukan oleh MILF membuat pemerintah Filipina harus mengambil tindakan yang tegas. Sehingga pada tanggal 21-24 Oktober 1996, pasukan militer pemerintah Filipina melakukan serangan terhadap MILF yang menyebabkan tewasnya 33 anggota MILF (UCA 2021).

2.2.1 Periode Pemerintahan Joseph Estrada (1998-2001)

Insiden 1996 tersebut telah menimbulkan bentrokan kekerasan antara pihak MILF dengan pemerintah Filipina. insiden tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa dan telah menimbulkan banyak kerugian terhadap kedua

belah pihak yaitu pemerintah Filipina dan MILF. Kemudian pada tahun 1997, untuk dapat mengakhiri konflik antar kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi maka dibuatlah suatu perjanjian gencatan senjata. Inti dari perjanjian gencatan senjata tersebut yaitu menetapkan bahwa pasukan yang dibawah kendali pemerintah Filipina akan dipindahkan dari daerah yang dikuasai oleh MILF dan menetapkan bahwa pemerintah Filipina harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan MILF sebelum melakukan suatu tindakan atau operasi di daerah yang dikuasai oleh MILF (Bale 2015). Perjanjian tersebut tidak berlangsung lama di karenakan adanya pergantian presiden yaitu presiden Fidel Ramos di ganti oleh Joseph Estrada.

Memasuki pemerintahan yang baru, intensitas konflik justru semakin meningkat antara MILF dengan pemerintah Filipina. Hal tersebut dikarenakan proses perdamaian yang telah diperjuangkan oleh presiden sebelumnya tidak diteruskan dan tidak dijalankan oleh Joseph Estrada. Sikap atau kebijakan yang di keluarkan oleh Joseph Estrada semakin mendukung asumsi tersebut. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Joseph Estrada yaitu kebijakan all-out war atau perang habis-habisan terhadap MILF. Pembuatan kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan Joseph Estrada memiliki anggapan bahwasanya jika ingin menciptakan perdamaian maka tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan membantai dan melenyapkan seluruh anggota MILF beserta institusinya. (Sandria 2018).

Pada tahun 2000, pemerintah Filipina memulai aksi serangan terhadap MILF. Serangan tersebut di lakukan di provinsi Maguindanao di pulau Mindanao yang mengakibatkan tewasnya 23 anggota MILF dan 2 pasukan militer Filipina.

Bentrokan antar pemerintah Filipina dan MILF makin tidak terkendali, setelah pemerintah Filipina berhasil merebut markas besar MILF (Camp Abu Bakr). Akibat dari bentrokan tersebut, diperkirakan telah memakan sekitar kurang lebih 500 korban jiwa. Selain itu bentrokan tersebut juga berdampak terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan 500.000 warga terpaksa mengungsi dari area bentrokan yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina mengungsi (UCA 2021). Konflik mulai mereda pada saat Joseph Estrada di lengserkan dari kursi kepresidenan tepatnya pada awal tahun 2001. Pemerintahan pada era Joseph Estrada dinilai telah banyak menimbulkan kerugian bagi negara Filipina itu sendiri. Sehingga banyak tokoh masyarakat Filipina yang menuntut agar Joseph Estrada mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada waktu itu.

2.2.2 Periode Pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010)

Pada awal pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo, tindakan yang pertama kali dilakukan untuk dapat meredakan konflik dengan MILF yaitu dengan membuat suatu perjanjian gencatan senjata. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya peningkatan konflik akibat permasalahan yang telah ditimbulkan oleh presiden sebelumnya yaitu Joseph Estrada. Melihat hal tersebut, MILF mengajukan tiga syarat untuk dapat menandatangani perjanjian gencatan senjata tersebut. Tiga syarat tersebut yaitu yang pertama, setiap pembicaraan antara MILF dan pemerintah Filipina harus di mediasi oleh OKI atau salah satu negara anggota OKI. Kedua, MILF dan pemerintah Filipina harus menghormati perjanjian sebelum nya (Tripoli dan Final Peace Agreement). Ketiga, setiap pembicaraan antara MILF dan pemerintah Filipina harus di adakan di negara asing (Thalang 2017). Kemudian ketiga syarat tersebut telah disetujui oleh pemerintah

Filipina dan MILF bersedia untuk melakukan penandatanganan terkait dengan perjanjian gencatan senjata tersebut.

Pasca meninggalnya Salamat Hasim pada tahun 2003, kemudian digantikan oleh Al Haj Murad Ibrahim. Pada masa kepemimpinan Al Haj Murad Ibrahim, MILF lebih cenderung bersifat moderat dalam memperjuangkan hak hak Bangsamoro dibandingkan pada masa kepemimpinannya Salamat Hasim. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pembicaraan damai antara MILF dengan pemerintah Filipina dan menurunnya intensitas konflik antara kedua belah pihak (Rafiq 2017). Al Haj Murad Ibrahim lebih mengedapankan metode mediasi atau perundingan dalam memperjuangkan hak hak Bangsamoro, hal tersebut dilakukan karena untuk dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat konflik yang terjadi antara MILF dengan pemerintah Filipina. Selain itu kesadaran bahwa konflik hanya akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak menjadi factor menurunnya intensitas konflik antar keduanya.

Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan membuat suatu tim pengawas keamanan yaitu *International Monitoring Team (IMT)* yang terdiri dari 57 personil dari 4 negara yaitu Malaysia, Brunei, Libya, dan Jepang. Tugas utama dari IMT ini adalah untuk dapat memastikan adanya perjanjian damai antara MILF dan pemerintah Filipina (Hasni 2011). IMT ini didirikan untuk memantau secara khusus proses perundingan damai antara pihak MILF dengan pemerintah Filipina agar dapat segera tercapai.

Konflik yang terjadi antara MILF dan pemerintah Filipina merupakan konflik yang berkepanjangan di karenakan perbedaan pandangan dalam berbagai hal antar keduanya. Pemerintah Filipina memiliki misi untuk menghilangkan

identitas Bangsamoro terhadap masyarakat di Kawasan Mindanao, dan MILF memiliki misi untuk mempertahankan identitas Bangsamoro dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. Memiliki misi yang berlawanan satu sama lain, mengakibatkan sulitnya untuk mencapai kata damai antar kedua belah pihak. Final Peace Agreement 1996 merupakan salah satu bentuk kegagalan perundingan damai antara kedua belah pihak.

Pada tahun 2008, MILF dan pemerintah Filipina kembali merumuskan suatu perjanjian yang dirancang untuk dapat menghentikan konflik antar keduanya yaitu pembentukan *Memorandum of Agreement on Ancestral Domain* atau yang lebih di kenal dengan nama MOA-AD (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). MOA-AD ini dirancang untuk menghentikan konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dan MILF yang pada saat itu sedang meningkat. Akibat dari konflik pada waktu itu, diperkirakan kurang lebih sekitar 1000 orang tewas dan 750.000 mengungsi dari Kawasan Mindanao (UCA 2021).

Perjanjian MOA-AD berisi tentang pengaturan wilayah ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) yang sebelumnya sudah dibahas pada perjanjian tripoli. MOA-AD juga berisi tentang pemberian hak oleh pemerintah Filipina terhadap Bangsamoro dalam mengurus wilayah dan sumber daya dibawah konsep hak asasi manusia, dan juga di berikan kewenangan untuk dapat membentuk kepolisian sendiri (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Namun perjanjian atau rancangan tersebut kembali mengalami kegagalan. Hal tersebut dikarenakan batal menandatangani rancangan tersebut. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, dikarenakan banyaknya tekanan yang diterima oleh pemerintah Filipina khususnya dari anggota MNLF yang tidak

menyetujui isi dari MOA-AD itu sendiri dan juga di anggap bahwa perjanjian MOA-AD tidak konstitusional. Kegagalan perjanjian tersebut menyebabkan kembalinya konflik antara kedua belah pihak, pemberontakan mulai dilakukan kembali oleh MILF sebagai bentuk rasa kekecewaannya terhadap sikap pemerintah Filipina yang tidak konsisten (Muslim 2011).

Kemudian pada tahun 2009, untuk dapat mengakhiri konflik yang terjadi antara MILF dan pemerintah Filipina maka di bentuk suatu badan *ad-hoc*. Badan *ad-hoc* ini sendiri dikenal dengan sebutan *International Contact Group* (ICG) (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). ICG sendiri merupakan badan *ad-hoc* yang disepakati oleh MILF dan pemerintah Filipina pada tanggal 15 September 2009. ICG beranggotakan empat negara yaitu, Inggris, Turki, Jepang, Arab Saudi, dan empat NGOs yaitu Muhammadiyah, Consiliation Resources, Humanitarian Dialog Center, The Asia Foundation (Istiqomah 2014). ICG memiliki peran sebagai mediator atau penengah konflik antara MILF dan pemerintah Filipina. Latar belakang terbentuknya ICG ini sendiri yaitu karena perundingan damai antara MILF dan pemerintah Filipina selalu mengalami kegagalan. Hal tersebut mendorong pemerintah Filipina dan MILF untuk membentuk ICG agar konflik yang sudah berkepanjangan dapat segera berakhir dan tercapainya kata damai antara kedua belah pihak. Peran ICG sebagai mediator di dalam konflik MILF dan pemerintah Filipina telah membawa kemajuan dalam upaya menyelesaikan konflik.

2.2.3 *Periode pemerintahan Benigno Aquino III (2010-2016)*

Pasca terpilihnya Benigno Aquino III sebagai presiden Filipina tahun 2010 menggantikan presiden sebelumnya yaitu Gloria Macapagal Arroyo intensitas

konflik dengan MILF semakin menurun. Hal tersebut tidak terlepas juga dari peran ICG sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam upaya penyelesaian konflik dengan MILF. ICG berperan sebagai fasilitator dalam setiap pertemuan formal yang diadakan oleh MILF dan pemerintah Filipina.

Salah satu bentuk kemajuan yang di bawa oleh ICG yaitu penandatanganan *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB) antara MILF dan pemerintah Filipina pada 15 Oktober 2012. Adapun isi dari FAB sendiri yaitu adanya pengakuan Bangsamoro sebagai entitas politik baru yang diberi nama Bangsamoro sebagai pengganti dari ARMM. Kemudian adanya perumusan Undang Undang Dasar Bangsamoro yang akan dijadikan sebagai dasar hukum bagi Bangsamoro itu sendiri (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017).

Konflik yang sudah berkepanjangan antara MILF dengan pemerintah Filipina sudah mulai menemukan titik terang. Penurunan intensitas antara kedua belah pihak semakin jelas terlihat dengan terciptanya perjanjian damai antar keduanya. Perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diberi nama yaitu *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB). CAB sendiri resmi ditanda tangani pada tanggal 27 maret 2014 oleh kedua belah pihak yang berkonflik yaitu MILF dan pemerintah Filipina, dan juga Malaysia sebagai pihak yang telah ditunjuk sebagai penengah konflik.

2.2.4 *Periode Pemerintahan Rodrigo Duterte (2016-sekarang)*

Memasuki pemerintahan Rodrigo Duterte, konflik keduanya semakin mereda. Hal tersebut di dukung dengan terjalannya suatu kesepakatan Kerjasama antara MILF dan pemerintah Filipina melawan atau menentang kehadiran ISIS di

Filipina pada tahun 2017 (Villamour 2018). Kerjasama tersebut sekaligus menjadi Langkah awal terciptanya perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina.

2.3 Aliansi MILF

MILF merupakan salah satu gerakan terbesar dan paling berpengaruh dikawasan Mindanao dan MILF juga dianggap sebagai gerakan yang merepresentasikan kepentingan Bangsamoro. Dalam memperjuangkan kepentingan Bangsamoro, MILF telah melibatkan beberapa aktor kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. Pelibatan para aktor eksternal tersebut, tidak terlepas dari kebijakan all-out war yang di keluarkan oleh pemerintah Joseph Estrada terhadap MILF. Kebijakan tersebut mengharuskan MILF untuk dapat mencari bantuan atau dukungan dari aktor eksternal seperti Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah, OKI, dan juga Malaysia. Hal tersebut dilakukan untuk dapat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina yang pada saat itu ingin melenyapkan seluruh anggota MILF beserta institusinya. Melakukan perlawanan terhadap pemerintah bukan merupakan alasan utama MILF dalam melakukan aliansi dengan aktor eksternal. Ingin melakukan perundingan merupakan alasan utama MILF dalam menjalin aliansi dengan aktor eksternal. Berikut beberapa aktor eksternal yang terlibat kedalam konflik antara MILF dan pemerintah Filipina.

2.3.1 Al-Qaeda

Al-Qaeda merupakan salah satu Gerakan terorisme terbesar di dunia yang didirikan oleh Osama bin Laden pada kisaran tahun 1984 sampai dengan 1986 (Rouiller 2002). Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok jihadis yang paling mematikan di dunia, hal tersebut dikarenakan berbagai aksi yang telah dilakukan

oleh kelompok ini (Ali 2019). Selain itu, Al-Qaeda diketahui memiliki banyak kelompok afiliasi dan kelompok asosiasi yang sudah tersebar diberbagai negara yang ada di dunia. Kelompok afiliasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu kelompok yang telah mengakui secara terang terangan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan telah menerima pengakuan dari masyarakat internasional. Sedangkan kelompok asosiasi yaitu kelompok yang memiliki karakteristik yang sama dengan Al-Qaeda seperti ideologi yang sama. Perbedaan yang paling mencolok antara kelompok afiliasi dan asosiasi yaitu terdapat pada mekanisme operasi kelompok. Kelompok afiliasi cenderung mengatasnamakan Al-Qaeda dalam setiap tindakannya, sedangkan kelompok asosiasi cenderung mengatasnamakan kelompok sendiri dalam setiap tindakan yang dilakukannya (Fuad 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas, MILF di kategorikan sebagai salah satu kelompok asosiasi dari Al-Qaeda. Hal tersebut dikarenakan MILF memiliki tujuan yang sama dengan Al-Qaeda yaitu untuk mendirikan sebuah negara yang berbasis Islam dan sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah. Selain itu, MILF juga memiliki pemikiran yang sama dengan Al-Qaeda yaitu sama-sama ingin meningkatkan nilai-nilai dan ajaran islam dalam keanggotaannya. Satu hal yang menjadi alasan yang menguatkan MILF termasuk ke dalam kelompok asosiasi Al-Qaeda yaitu dalam setiap tindakan yang dilakukan selalu mengatasnamakan MILF, dan berusaha untuk menyangkal keterlibatan Al-Qaeda dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh MILF.

Hubungan antara MILF dan Al-Qaeda mulai muncul Ketika banyaknya petinggi dari MILF yang menimba ilmu di Timur Tengah. Termasuk Salamat Hasyim selaku pendiri dari Gerakan MILF. Kedekatan keduanya dibuktikan

dengan adanya Kerjasama yang terjalin antar keduanya seperti Kerjasama dalam bidang militer dan dana untuk keperluan perjuangan dan perlawanan (Rafiq 2017). Kerjasama dalam bidang militer yaitu seperti peneydiaan camp pelatihan di daerah MILF yang digunakan oleh Al-Qaeda untuk Latihan militer. Sedangkan untuk MILF, mendapatkan dana dan persenjataan untuk melakukan perlawanan dalam memperjuangkan kepentingan Bangsamoro.

Pasca meninggalnya Hasim Selamat, kedekatan antara MILF dan Al-Qaeda mulai renggang. Hal tersebut dikarenakan pemimpin setelah meninggalnya Selamat Hasyim yaitu Al Haj Murad Ibrahim lebih cenderung menggunakan metode yang bersifat moderat dalam memperjuangkan kepentingan Bangsamoro. Menurunnya intensitas konflik antara MILF dan pemerintah Filipina semakin membuat hubungan MILF dan Al-Qaeda semakin renggang. Selain itu, Al-Haj Murad Ibrahim selaku ketua MILF pasca Hasim Selamat lebih mengutamakan metode mediasi atau perundingan dalam penyelesaian konflik dengan pemerintah Filipina (Rafiq 2017).

2.3.2 *Jamaah Islamiyah*

Jamaah Islamiyah mulai resmi didirikan pada tahun 1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Jamaah Islamiyah merupakan gerakan terorisme yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan dari dibentuknya gerakan ini yaitu untuk mendirikan negara yang berbasis Islam dan mewujudkan kekhalifahan Islam di negara negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan (Safrudin 2013).

Terdapat beberapa wilayah yang berada dibawah komando jama'ah Islamiyah yang dikenal dengan istilah *mantiqi*. Mantiqi sendiri merupakan kata lain dari komando wilayah yang mengatur dan memiliki fungsi di wilayah tertentu. Ada empat jenis mantiqi dalam Jamaah Islamiyah. Pertama, Mantiqi 1 (Ula) berfungsi untuk menyediakan pendanaan bagi Jamaah Islamiyah. Mantiqi 1 ini meliputi wilayah Semenanjung Malaysia dan Singapura. Kedua, Mantiqi 2 (Tsani) bertanggung jawab dalam hal perekrutan anggota dan bertanggung jawab juga dalam menjalankan jaringan camp pelatihan Jamaah Islamiyah. Mantiqi 2 ini meliputi wilayah Indonesia. Ketiga, Mantiqi 3 (Tsalis) berfungsi sebagai pendukung jihad Jamaah Islamiyah. Mantiqi 3 bertanggung jawab dalam persediaan peralatan dan persenjataan seperti bahan peledak. Mantiqi 3 ini meliputi wilayah Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Mindanao. Keempat, Mantiqi 4 (Ukhro) meliputi wilayah Australia dan Papua. Wilayah mantiqi 4 ini juga di jadikan sebagai tempat perekrutan anggota dan pengumpulan dana bagi Jamaah Islamiyah (Safrudin 2013).

Hubungan antara MILF dan Jamaah Islamiyah mulai terbentuk pada saat mengikuti pelatihan militer di Afghanistan. Faktor yang mendorong MILF untuk melakukan kerjasama dengan Jamaah Islamiyah yaitu karena adanya persamaan tujuan antara keduanya. Persamaan tujuan tersebut yaitu sama-sama ingin mendirikan kekhalifahan di wilayah masing masing (Rafiq 2017). Mantiqi 3 juga memiliki peran sebagai penghubung antara MILF dengan Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan mantiqi 3 mencakup wilayah Mindanao. MILF diketahui menyediakan tempat pelatihan untuk Jamaah Islamiyah di Kawasan Mindanao dan sebagai gantinya Jamaah Islamiyah juga memberikan pelatihan militer terhadap

anggota MILF untuk dapat melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Pelatihan yang di berikan oleh Jamaah Islamiyah terhadap MILF berupa pelatihan dalam penggunaan peluncur geranat, mortir, senjata anti-tank, serta *howitzer* (Larasati 2015) .

Kedekatan antara MILF dan Jamaah Islamiyah mulai menurun pasca terpilihnya Al Haj Murad Ibrahim sebagai ketua MILF. Hal tersebut dikarenakan metode perjuangan yang dibawa oleh Al-Haj Murad Ibrahim berbeda dengan Salamat Hasim. Kemudian hal tersebut juga mempengaruhi hubungan antara MILF dan Jamaah Islamiyah. Metode perundingan damai lebih diutamakan oleh Al-Haj Murad Ibrahim (Rafiq 2017). Hal tersebut sekaligus menghilangkan peran dari Jama'ah Islamiyah itu sendiri. Selain itu, keretakan di dalam Jamaah Islamiyah juga menjadi factor menurunnya kerja sama antara keduanya. Jamaah Islamiyah telah mengalami perpecahan dan bertransformasi menjadi berbagai Jama'ah, diantaranya yaitu Jama'ah Ansharut Tauhid dan Jama'ah Ansharut Syariah (Armandhanu 2014).

2.3.3 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI merupakan organisasi berbasis Islam terbesar di dunia yang memiliki 57 negara anggota yang tersebar diberbagai benua di dunia (Dewinta 2016). OKI pertama kali diresmikan pada tahun 1969. Latar belakang terbentuknya OKI yaitu karena keresahan negara negara Islam terkait pembakaran Masjidil Aqsha yang dilakukan oleh Isarel pada tahun 1969 (Azhar 2002). Tindakan Israel tersebut memicu protes dari negara negara Islam terhadap sikap PBB yang sangat lambat dalam menangani kasus tersebut. Keresahan negara negara Islam akan hal tersebut dikarenakan Masjidil Aqsha merupakan salah satu tempat bersejarah didalam

Islam. Peristiwa pembakaran tersebut menjadi salah satu pemicu terbentuknya OKI.

Adapun tujuan dibentuknya OKI yaitu untuk meningkatkan solidaritas antar negara negara Islam, menggalang kerja sama antar negara negara Islam dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, budaya, dll), mendukung kedamaian dan keamanan internasional, serta mengecam segala bentuk deskriminasi dan kolonialisasi, melindungi tempat tempat suci dan bersejarah dalam Islam, dan yang terakhir membantu pembentukan palestina sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat (Dewinta 2016).

Terkait dengan konflik Moro yang terjadi di Filipina selatan, OKI mulai terlibat sejak tahun 1973 (Istiqomah 2014). Dalam hal ini OKI memandang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap masyarakat Moro sebagai bentuk tindakan diskriminasi terhadap minoritas. Hal tersebut menjadi salah satu alasan keterlibatan OKI dalam konflik Moro. Salah satu tujuan awal dibentuknya OKI yaitu untuk menghapuskan tindakan diskriminasi dalam segala bentuknya (Azhar 2002). Oleh karena itu OKI mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap masyarakat Moro. Berbagai upaya telah dilakukan oleh OKI untuk dapat meredakan konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Moro seperti membuat perjanjian Tripoli dan Final Peace agreement.

Sejak berdirinya Gerakan MILF dan secara perlahan mulai menjadi suatu gerakan yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Moro. OKI dan MILF mulai membangun kerjasama dalam pembicaraan damai untuk dapat mengakhiri konflik dengan pemerintah Filipina. MILF dianggap sebagai gerakan

yang merepresentasikan kepentingan Bangsamoro dibandingkan gerakan lainnya. Selain itu, ideologi yang dianut oleh MILF menjadi salah satu alasan kenapa MILF dijadikan sebagai representasi dari kepentingan Bangsamoro. MILF menganut ideologi *Islam murni*, dan sangat berbeda jauh dengan MNLF yang menganut ideologi *nasionalis sekuler* (Nasir 2019). OKI sangat menentang pemikiran pemikiran sekuler. Salah satu negara yang memperkasai terbentuknya OKI yaitu Arab Saudi memiliki anggapan bahwa identitas Islam merupakan lawan dari pemikiran pemikiran sekuler (Azhar 2002).

Dalam konflik yang terjadi antara MILF dan pemerintah Filipina, OKI berperan sebagai mediator untuk dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang sudah berkepanjangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh OKI yaitu dengan mengadakan pertemuan tripartit antara pemerintah Filipina dan MILF. Pertemuan tersebut dirancang untuk dapat menemukan jalan bagi implementasi dari perjanjian perjanjian sebelumnya seperti perjanjian *Tripoli* dan *Final Peace Agreement*. Selain sebagai mediator, OKI juga berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi perundingan antara MILF dan pemerintah Filipina dalam menentukan jalan keluar untuk dapat mencapai kata damai antara kedua belah pihak (Sandria 2018). Salah satu upaya yang dilakukan oleh OKI sebagai fasilitator dalam hal ini yaitu pembentukan Bangsamoro Coordination Forum (BCF). BCF ini ditujukan sebagai tempat bagi MNLF dan MILF untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan kerjasama dalam upaya perjuangan damai untuk tujuan bersama (Sandria 2018).

Pada tahun 2017, OKI mengadakan sidang perdamaian untuk dapat menetapkan kesepakatan antara pihak pihak yang berkonflik. Hasil dari sidang

tersebut menetapkan bahwa pemerintah Filipina harus bekerjasama dengan MILF dan MNLF untuk mengadopsi segala kebaikan yang ada di perjanjian Tripoli 1978 dan Final Peace Agreement untuk dapat membentuk otonom Bangsamoro (Sandria 2018). Hal tersebut menjadi awal mulai menurunnya intensitas konflik yang ada di Filipina selatan dan menjadi langkah awal terjalinnya kerjasama antara MILF dengan pemerintah Filipina. Salah satu bentuk Kerjasama yang terjalin antara MILF dan pemerintah Filipina yaitu dalam hal melawan dan menentang kehadiran ISIS di Filipina pada tahun 2017 (Villamour 2018).

2.3.4 *Malaysia*

Keterlibatan Malaysia dalam konflik MILF dengan pemerintah Filipina dimulai pada tahun 2001. Sebelum tahun 2001, konflik MILF dengan pemerintah Filipina sedang dalam intensitas yang tinggi. Dimana pada saat itu pemerintah Filipina telah mengeluarkan kebijakan perang habis-habisan terhadap MILF (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Pada saat itu MILF dianggap sebagai suatu ancaman yang serius dan harus dimusnahkan dari kawasan Filipina. Kemudian, setelah adanya pergantian pemerintah Filipina pada awal tahun 2001. Kebijakan pun diubah dan mulai mengeluarkan kebijakan gencatan senjata oleh pihak pemerintah Filipina terhadap MILF. Dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, MILF mengajukan tiga syarat yang harus diterima oleh pemerintah Filipina. Pertama, setiap pembicaraan antara MILF dan pemerintah Filipina harus dimediasi oleh OKI atau salah satu negara anggota OKI. Kedua, MILF dan pemerintah Filipina harus menghormati perjanjian sebelumnya (Tripoli dan Final Peace Agreement). Ketiga, setiap pembicaraan antara MILF dan pemerintah Filipina harus diadakan di negara asing (Thalang 2017).

Mulai tahun 2001, Malaysia ditunjuk sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik antara MILF dan pemerintah Filipina. Hal tersebut dikarenakan Malaysia memiliki pengaruh besar didalam OKI. Malaysia sendiri merupakan salah satu pendiri dari OKI dan Malaysia juga merupakan sekjen pertama OKI yaitu Tengku Abdurrahman (Azhar 2002). Sejak Malaysia berperan sebagai mediator, intensitas konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina mulai menurun dan mulai membahas terkait perundingan damai antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk keberhasilan Malaysia sebagai mediator dalam konflik MILF dengan pemerintah Filipina yaitu terwujudnya kesepakatan *Framework of Agreement Bangsamoro* (FAB) pada tahun 2012. Hal tersebut menjadi langkah awal dari mulainya perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina. Kemudian di lanjutkan dengan terwujudnya suatu kesepakatan damai antara MILF dan pemerintah Filipina yang dikenal dengan nama *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB) pada tahun 2014 (Thalang 2017).

BAB III

ANALISIS IDENTITAS, KEPENTINGAN DAN TINDAKAN MILF

Pada bab ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian menggunakan teori konstruktivisme yang di kembangkan oleh Alexander Wendt. Penulis akan mengawalinya dengan membahas identitas dari MILF. Kemudian di lanjutkan dengan menganalisis terkait kepentingan apa yang di bawa oleh MILF. Dan yang terakhir, yaitu terkait dengan menganalisis tindakan apa yang di ambil oleh MILF agar kepentingan yang di bawa bisa tercapai.

3.1 Identifikasi Identitas MILF

Moro Islamic Liberation Front atau MILF dikenal sebagai suatu Gerakan yang merepresentasikan kepentingan dan hak-hak Bangsamoro. Sebelum terbentuknya Gerakan MILF, sudah terdapat beberapa Gerakan serupa yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. Akan tetapi kehadiran dari MILF ini memberikan suatu warna baru dalam perjuangan yang dilakukan oleh Bangsamoro. Hal tersebut dikarenakan MILF hadir dengan membawa metode perjuangan yang baru yaitu metode perundingan dalam perjuangannya mengembalikan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. Hal tersebut kemudian menjadi identitas yang membedakan antara MILF dengan Gerakan lainnya yang ada di Filipina. Selain itu, metode perundingan damai juga menjadi salah satu alasan terbentuknya Gerakan tersebut. Mengingat adanya perbedaan pendapat

terkait metode perjuangan yang terjadi antara Salamat Hasyim dengan Nur Misuari selaku ketua MNLF.

Berdirinya MILF tidak terlepas dari perbedaan pendapat terkait dengan metode perjuangan yang terjadi antara Nur Misuari dengan Salamat Hasim pasca kegagalan perjanjian Tripoli. Salamat Hasyim tidak setuju dengan sikap Nur Misuari yang mendeklarasikan jihad dan menunjukkan rasa kebencian terhadap pemerintah Filipina. Salamat Hasyim menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada agama Islam. Sehingga mengakibatkan keluarnya Salamat Hasyim dari Gerakan MNLF, dan kemudian membentuk Gerakan sendiri yaitu MILF. Salamat Hasyim menjadikan MILF sebagai suatu Gerakan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan ideologi yang dianut oleh MILF yaitu ideologi Islam murni (Nasir 2019). Metode perundingan dianggap sebagai suatu metode yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam.

Perbedaan metode atau cara dalam memperjuangkan hak-hak Bangsamoro menjadi alasan berdirinya MILF. MILF lebih mengutamakan metode perundingan damai dibandingkan menggunakan metode jihad, sedangkan MNLF lebih mengutamakan metode jihad dalam memperjuangkan hak-hak Bangsamoro. Begitu juga dengan Gerakan Abu Sayyaf yang lebih mengutamakan metode kekerasan atau bersifat radikal. Abu Sayyaf juga menolak perdamaian dengan pemerintah Filipina dan terus mengupayakan berdirinya Khilafah sesuai dengan tujuan dibentuknya Abu Sayyaf itu sendiri. Perbedaan antara MILF dan MNLF yaitu terkait metode dalam memperjuangkan hak-hak Bangsamoro, sedangkan perbedaan antara MILF dengan Abu Sayyaf terletak pada metode dan tujuan. Abu

Sayyaf bukan memperjuangkan hak hak Bangsamoro akan tetapi memperjuangkan untuk berdirinya khilafah di Kawasan Asia Tenggara (Samosir 2016).

Sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh MILF mencerminkan nilai-nilai ke Islaman didalam melakukan perjuangan. Islam sendiri dapat dimaknai sebagai suatu agama yang membawa kedamaian bukan membawa konflik ataupun perselisihan. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan sangat menentang segala bentuk kekerasan didalamnya. Akan tetapi adakalanya metode kekerasan di perbolehkan di dalam Islam, seperti saat pemerintah sudah mulai membatasi hak masyarakat dalam beragama dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dua kondisi tersebut merupakan permasalahan yang terjadi di kalangan Bangsamoro, dimana hak kebebasan beragama mereka sudah di rampas oleh pemerintah Filipina dengan adanya program kristenisasi. Program kristenisasi tersebut dianggap telah menodai nilai keberagaman yang ada di Filipina (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Aspirasi mereka sebagai masyarakat juga telah diabaikan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan munculnya perlawanan dari berbagai gerakan yang mengecam sikap atau tindakan pemerintah Filipina.

MILF menjadikan Islam sebagai acuan atau pedoman dalam mengatur segala bentuk aspek kemasyarakatan atau keanggotaan dari MILF itu sendiri. Salah satu bukti dimana MILF mengacu terhadap ajaran Islam yaitu dengan menjadilakn Islam sebagai dasar hukum peradilan terhadap Kawasan yang berada dibawah kendali MILF. MILF juga mendirikan suatu badan khusus untuk dapat memastikan ajaran Islam itu ditegakkan didaerah yang dikuasai oleh MILF. Badan

yang didirikan oleh MILF itu sendiri yaitu *Internal Security Force* atau yang lebih di kenal dengan sebutan ISF (Wilson Jr. 2009). Hal tersebut menjadi bukti MILF sebagai suatu Gerakan perjuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman di dalamnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, Terdapat tiga point penting dalam identitas dari MILF: pertama, sebagai suatu gerakan separatism yang menjunjung tinggi nilai keislaman di dalam keanggotaan dan daerah kawasannya. Kedua, sebagai suatu gerakan perjuangan moro yang merepresentasikan kepentingan moro bukan kepentingan organisasi seperti Gerakan Abu Sayyaf. Ketiga, sebagai suatu gerakan yang lebih mengutamakan metode perundingan damai.

Berdasarkan konsep identitas yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, identitas dapat dipahami melalui dua pemaknaan yaitu identitas sebagai kategori sosial dan identitas sebagai kategori personal. MILF termasuk kedalam identitas sebagai kategori sosial. Hal tersebut dikarenakan MILF memerlukan suatu atribut atau karakteristik yang dapat membedakannya dari Gerakan lainnya yang ada di Filipina. Atribut atau karakteristik yang membedakan MILF dengan Gerakan yang lain yaitu terkait metode perjuangan yang digunakan oleh MILF itu sendiri. Metode perjuangan melalui jalur perundingan merupakan atribut atau karakteristik yang digunakan oleh MILF dalam membedakan dirinya dengan Gerakan yang lain seperti MNLF dan Abu-Sayyaf. Hal tersebut dikarenakan Gerakan seperti MNLF dan Abu-Sayyaf lebih cenderung menggunakan metode jihad (kekerasan) dalam perjuangan untuk dapat mengembalikan hak-hak Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina.

3.3.1 Role Identity Sebagai Kategori Identitas Yang Dibentuk Oleh MILF Dalam Aliansinya.

Alexander Wendt membagi identitas kedalam 4 kategori yang salah satu diantaranya yaitu role identity atau identitas peran. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya role identity merupakan suatu identitas yang menentukan posisi aktor didalam internasional. Identitas ini terbentuk apabila aktor yang satu dengan aktor yang lain menjalin suatu hubungan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dalam salah satu aktor. MILF dikategorikan sebagai role identity karena hubungan yang terjalin antara MILF dengan masing masing aliannya memiliki pengaruh dan peran dalam menentukan langkah atau kebijakan yang akan dibuat oleh MILF itu sendiri. Contohnya seperti aliansi yang terjalin antara MILF dengan OKI, dimana OKI dapat menentukan atau mempengaruhi suatu kebijakan yang akan dibuat oleh MILF. Ketika MILF menjalin aliansi dengan OKI, maka MILF akan lebih cenderung melakukan suatu upaya perundingan perdamaian dengan pemerintah Filipina. Hal tersebut dikarenakan peran OKI itu sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik antara MILF dengan Filipina. Contoh lainnya yaitu aliansi yang terjalin antara MILF dengan Al-Qaeda, dalam hal ini Al-Qaeda juga dapat mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil oleh MILF. Aliansi MILF dengan Al-Qaeda mempengaruhi tindakan yang diambil oleh MILF itu sendiri. Tindakan seperti melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Hal tersebut dikarenakan peran Al-Qaeda didalam konflik itu sebagai pemberi pelatihan militer dan penyokong dana persenjataan MILF dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina.

Berdasarkan pemaparan tersebut, posisi MILF didalam konflik dengan pemerintah Filipina akan dapat dilihat tergantung dengan siapa MILF itu menjalin aliansi. Setiap aliansi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap arah kebijakan yang akan diambil MILF itu sendiri.

3.2 Analisis Kepentingan MILF

MILF didirikan dengan tiga tujuan utama yaitu: pertama, untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina. Mohagher Iqbal selaku ketua panel perdamaian antara MILF dengan pemerintah Filipina memaparkan ada tiga factor yang mendorong MILF dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina yaitu :

1. Hak kebebasan Bangsamoro dalam beragama yang telah di rampas oleh pemerintah Filipina dengan kebijakan program kristenisasi.
2. Perampasan lahan pemukiman Bangsamoro yang di lakukan oleh pemerintah Filipina dengan adanya kebijakan program imigrasi.
3. Pembantaian yang di lakukan oleh pemerintah Filipina terhadap masyarakat yang menolak identitas sebagai masyarakat Filipina dan lebih memilih identitas sebagai orang Islam (Taya 2007).

Ketiga faktor tersebut merupakan kepentingan Bangsamoro yang diperjuangkan oleh MILF. Program kristenisasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina merupakan program yang sudah ada sejak zaman colonial Spanyol di Filipina. Hal tersebut lantas mengingatkan Bangsamoro akan memori kelam tersebut dan menilai tindakan yang dilakukan pemerintah Filipina telah menodai nilai keberagaman didalam suatu negara. Program imigrasi yang dilakukan oleh

pemerintah Filipina merupakan program perpindahan penduduk Filipina (masyarakat Filipina) ke wilayah Filipina bagian selatan (Bangsamoro). Hal tersebut dilakukan untuk dapat menanamkan nilai nilai atau identitas Filipina terhadap Bangsamoro dan untuk menghapus identitas Islam di seluruh Kawasan yang ada di Filipina. Kemudian pemerintah Filipina memberlakukan sesuatu kebijakan yang dikenal dengan politik genosida. Hal tersebut dilakukan terhadap Bangsamoro yang menolak identitas sebagai masyarakat Filipina dan tetap memilih Islam sebagai identitas dari Bangsamoro itu sendiri. Perlakuan pemerintah tersebut lantas membuat MILF melakukan perlawanan terhadap pemerintah untuk dapat memperjuangkan hak hak Bangsamoro kembali. Hal tersebut juga telah menjadi alasan didirikannya gerakan MILF.

Kedua, tujuan didirikannya gerakan MILF yaitu untuk mendirikan suatu negara dan pemerintahan yang berbasis Islam. Sebelum kemerdekaan Filipina dari Amerika Serikat, Bangsamoro telah melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu menyerahkan Mindanao untuk masuk ke dalam kemerdekaan Filipina pada waktu itu. Aksi protes tersebut didasari oleh oleh rasa tidak terima Bangsamoro terhadap Tindakan Amerika Serikat. Kawasan Mindanao yang merupakan tempat tinggal Bangsamoro tidak berhasil dikuasai oleh Spanyol pada waktu menjajah Filipina. Bangsamoro menilai bahwa Spanyol tidak berhasil dalam menaklukan Mindanao pada waktu itu dan Bangsamoro tidak ingin Kawasan Mindanao dimasukkan ke dalam kemerdekaan Filipina (Berutu 2019). Di sisi lain, Bangsamoro juga menyampaikan pendapatnya bahwasanya tidak pantas apabila didalam suatu negara ada ada dua pihak yang bermusuhan

(Islam dan Kristen). Bangsamoro telah menganggap masyarakat Filipina yang beragama Kristen sebagai musuh Islam yang abadi (Islam 2005).

Berdasarkan hal tersebut, MILF bertujuan untuk mengembalikan kemerdekaan Mindanao dari Filipina dan kemudian membangun suatu negara yang pemerintahannya berbasis Islam.

Ketiga, tujuan didirikannya MILF yaitu untuk menegakkan Firman Tuhan (Allah) dan menjadikannya sebagai suatu tatanan dalam mengatur segala aspek kehidupan Bangsamoro. Terkait dengan hal tersebut, MILF telah mulai mengimplementasikan tujuannya ini di daerah-daerah yang dikuasainya dengan mendirikan suatu badan khusus yaitu *Internal Security Force* atau yang lebih dikenal dengan ISF. ISF ini sendiri dibentuk untuk dapat menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam di setiap Kawasan yang dikuasai oleh MILF itu sendiri (Wilson Jr. 2009).

Terdapat tiga poin utama dalam kepentingan yang dibawa oleh MILF terkait konflik dengan pemerintah Filipina yaitu: pertama, mengembalikan hak-hak Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina. Kedua, mendirikan suatu negara (Mindanao) dan system pemerintahan yang berbasis Islam. Ketiga, yaitu menjalankan Firman Tuhan (Alloh) dan menegakkan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian dari poin sub bab sebelumnya yaitu terkait dengan identifikasi identitas MILF, maka kepentingan yang dibawa oleh MILF yaitu untuk dapat melakukan suatu perundingan dengan pemerintah Filipina terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari MILF itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan identitas MILF itu yaitu sebagai suatu Gerakan yang mengutamakan metode

perundingan dalam memperjuangkan hak-hak Bangsamoro. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Alexander Wendt terkait hubungan antara identitas dan kepentingan. Identitas merupakan prasyarat dari kepentingan suatu aktor. Sehingga disini melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina terkait dengan tiga poin yang diatas menjadi kepentingan yang dibawa oleh MILF.

3.3 Analisis Tindakan Yang Diambil Oleh MILF Dalam Memperjuangkan Kepentingan Bangsamoro

Berdasarkan pemaparan pada poin-poin sub bab sebelumnya, identitas dari MILF yaitu sebagai suatu Gerakan perjuangan Bangsamoro yang menggunakan metode perundingan. Kepentingan yang dibawa oleh MILF yaitu untuk dapat melakukan suatu perundingan dengan pemerintah Filipina terkait hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. Kepentingan tersebut mendorong MILF untuk dapat melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk dapat mencapai kepentingan yang di bawa oleh MILF itu sendiri. Melibatkan para aktor eksternal kedalam konflik merupakan salah satu upaya atau tindakan yang diambil oleh MILF dalam konflik dengan pemerintah Filipina.

Tahun 1997, menjadi awal dari keterlibatan para aktor seperti Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah. Kemudian disusul dengan keterlibatan OKI, dan Malaysia. Pada tahun tersebut telah terjadi pergantian presiden yaitu Fidel Ramos diganti oleh Joseph Estrada. Pergantian tersebut juga berdampak terhadap perubahan kebijakan oleh Joseph Estrada. Kebijakan perdamaian yang telah digagas oleh pemerintah sebelumnya tidak diteruskan oleh Joseph Estrada. Hal tersebut dikarenakan Joseph Estrada lebih memilih jalan kekerasan dari pada perundingan

dalam menyelesaikan konflik dengan MILF. Kebijakan all-out war dikeluarkan oleh Joseph Estrada terhadap MILF. Hal tersebut dikarenakan Joseph Estrada memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan kedamaian maka harus membantai atau menenyapkan seluruh anggota MILF beserta institusinya (Sandria 2018).

Kebijakan all-out war atau perang habis-habisan yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina direspon oleh MILF dengan mencari aliansi atau melibatkan aktor eksternal kedalam konflik tersebut. Pelibatan aktor eksternal tersebut ditujukan untuk dapat menandingi kekuatan dari pemerintah Filipina yang ingin menenyapkan MILF beserta institusinya. Selain itu pelibatan para aktor eksternal juga ditujukan untuk dapat membantu MILF dalam upaya melakukan perundingan damai sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan pemerintah Filipina. Keterlibatan para aktor eksternal kedalam konflik juga dipengaruhi oleh adanya persamaan dalam hal identitas dan kepentingan antara masing masing aliansi dengan MILF.

3.1.1 Melakukan Tindakan Perlawanan Terhadap Pemerintah Filipina Yang Didukung Oleh Al-Qaeda Dan Jama'ah Islamiyah

Pada awal berdirinya MILF, perlawanan terhadap pemerintah Filipina bukan lah menjadi prioritas utama dari MILF. Akan tetapi lebih kepada penguatan keanggotaan didalam MILF itu sendiri dengan cara lebih berfokus terhadap kemandirian ekonomi, peningkatan Islamisasi, dan penguatan dalam bidang ke militeran (Bale 2015). Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan perlawanan dan tekanan terhadap pemerintah Filipina itu sendiri. Perlawanan yang dilakukan oleh MILF terhadap pemerintah Filipina merupakan suatu bentuk respon dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Filipina itu sendiri.

Perlawanan dalam hal ini yaitu bukanlah suatu sikap yang menunjukkan rasa kebencian terhadap pemerintah Filipina. Melainkan bentuk respon terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. MILF didirikan oleh Salamat Hasim karena perbedaan pandangan dengan Nur Misuari selaku ketua MNLF pada waktu itu. Perbedaan pandangan tersebut yaitu Salamat Hasim tidak setuju dengan sikap yang di tunjukkan oleh Nur Misuari setelah insiden kegagalan perjanjian Tripoli. Sikap tersebut yaitu berlawanan dan mulai menentang pemerintah Filipina. sikap Nur Misuari tersebut di tentang oleh Salamat Hasim dan lebih memilih untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada waktu itu dengan cara berunding di bandingkan harus menggunakan kekerasan (Samosir 2016).

Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina, MILF melibatkan aktor eksternal seperti Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah. Menjalin aliansi dengan kedua aktor tersebut ditujukan untuk dapat menandingi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Filipina. Aliansi yang terjadi antara dua organisasi tersebut dengan MILF dilandasi adanya persamaan diantara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Persamaan tersebut berupa persamaan dalam hal identitas maupun kepentingan dari gerakan itu sendiri. Aliansi yang pertama yaitu Al-Qaeda, dari segi identitas MILF dan Al-Qaeda memiliki suatu persamaan yaitu sesama Gerakan yang ingin menegakkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian dari segi kepentingan, MILF dan Al-Qaeda yaitu sama sama ingin memperkuat gerakan satu sama lain untuk dapat lebih mudah dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan adanya persamaan dalam hal identitas dan kepentingan menjadikan MILF untuk dapat melakukan aliansi dengan Al-Qaeda.

Kerjasama yang terjalin antara MILF dan Al-Qaeda berupa Kerjasama dalam bidang militer. Hal tersebut sesuai dengan kepentingan kedua Gerakan yang ingin sama sama memperkuat Gerakan satu sama lain. Kerjasama dalam bidang militer tersebut berupa penyediaan camp pelatihan di daerah MILF untuk digunakan oleh Al-Qaeda sebagai tempat Latihan militer. Hal yang didapatkan MILF beraliansi dengan Al-Qaeda yaitu berupa dana dan persenjataan untuk dapat memperkuat gerakan dalam hal melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak hak Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina (Rafiq 2017). Hal tersebut akan sangat membantu MILF dalam merespon tindakan atau kebijakan all-out war yang di keluarkan pemerintah Filipina pada tahun 1997.

Aliansi yang kedua yaitu Jama'ah Islamiyah, dari segi identitas MILF dan Jama'ah Islamiyah memiliki persamaan yaitu sesama gerakan separatis di wilayah masing-masing. MILF merupakan gerakan separatis yang berbasis di wilayah Filipina dan Jama'ah Islamiyah merupakan Gerakan separatis yang berbasis di Indonesia. Kemudian dari segi kepentingan, MILF dan Jama'ah Islamiyah memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama ingin mendirikan negara dan pemerintahan yang berbasis Islam. Adanya persamaan dari segi identitas dan kepentingan dari masing-masing gerakan akhirnya terbentuk suatu aliansi antar keduanya.

Kerjasama yang terjalin antara MILF dan Jama'ah Islamiyah yaitu Kerjasama dalam bidang militer, sama hal nya dengan Kerjasama yang terjalin antara MILF dan Al-Qaeda. MILF juga menyediakan camp pelatihan yang dapat di gunakan oleh Jama'ah Islamiyah untuk Latihan militer. Sedangkan Jama'ah Islamiyah memberikan pelatihan militer terhadap anggota MILF. Pelatihan militer

tersebut berupa pelatihan dalam penggunaan peluncur geranat, mortir, senjata anti-tank, serta *howitzer* (Larasati 2015) . Pelatihan tersebut akan dapat membantu MILF dalam mengatasi serangan yang di lakukan oleh pemerintah Filipina terkait dengan kebijakan All-out war itu sendiri.

3.3.2 Melakukan Upaya Perundingan Damai Dengan Pemerintah Filipina Yang Didukung Oleh Malaysia Dan OKI

Upaya atau tindakan yang dilakukan oleh MILF tidak hanya dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. MILF juga mengupayakan untuk melakukan suatu perundingan damai dengan pemerintah Filipina. Perundingan damai tersebut merupakan kepentingan yang dibawa oleh MILF dalam memperjuangkan hak-hak Bangsamoro. Melibatkan OKI dan Malaysia kedalam konflik dengan pemerintah Filipina merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh MILF untuk dapat mewujudkan terjadinya perundingan antar kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan identitas dan kepentingan yang dibentuk oleh MILF itu sendiri.

MILF memandang metode perundingan damai sebagai suatu metode perjuangan yang lebih baik dibandingkan metode yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan perjuangan yang menggunakan metode perundingan damai dianggap dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dalam konflik dengan pemerintah Filipina.

OKI dan Malaysia memiliki peranan penting dalam membantu MILF untuk dapat melakukan suatu perundingan damai dengan pemerintah Filipina. OKI merupakan suatu organisasi internasional yang didalamnya terdiri dari negara

negara Islam. OKI sendiri dianggap sebagai suatu organisasi yang sangat mendukung nilai-nilai Islam dalam keanggotaannya. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari dibentuknya OKI itu sendiri yaitu untuk meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam, menggalang kerja sama antar negara-negara Islam dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, budaya, dll), mendukung kedamaian dan keamanan internasional, serta mengecam segala bentuk diskriminasi dan kolonialisasi, melindungi tempat-tempat suci dan bersejarah dalam Islam, dan yang terakhir membantu pembentukan Palestina sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat (Dewinta 2016). Adapun dalam konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina, OKI memandang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Bangsa Moro merupakan tindakan diskriminasi terhadap minoritas. Hal tersebut mendorong OKI untuk dapat membantu Bangsa Moro dalam mengupayakan mengembalikan hak-hak Bangsa Moro itu sendiri.

MILF juga melibatkan Malaysia kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. Malaysia sendiri merupakan salah satu pendiri dan sekjen pertama dari OKI. Selain itu, Malaysia juga merupakan negara yang berada dalam satu kawasan dengan MILF yaitu Kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Malaysia untuk terlibat kedalam konflik antara MILF dan pemerintah Filipina. Hal yang mendorong MILF dalam melibatkan OKI dan Malaysia kedalam konflik dengan pemerintah Filipina yaitu karena adanya persamaan dalam hal identitas dan kepentingan antara masing-masing aktor.

Dari segi identitas, MILF dan OKI memiliki suatu persamaan yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman didalam keanggotaannya. Hal tersebut

dibuktikan dengan komitmen dari keduanya. MILF mendirikan suatu badan khusus yang bernama *Internal Security Force* (ISF). ISF tersebut dibentuk untuk dapat menegakkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam keanggotaannya dan juga wilayah yang berada dibawah kendali MILF. Sedangkan OKI yaitu terkait dengan tujuan didirikannya OKI itu sendiri yaitu untuk menjaga solidaritas antar Islam dan menegakkan kedamaian. Adanya rasa solidaritas antar umat Islam mendorong OKI untuk dapat terlibat kedalam konflik tersebut. Islam mengajarkan untuk saling membantu satu sama lain antar sesama muslim. Sesuai dengan Firman Allah didalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.

Sedangkan dari segi kepentingan, MILF dan OKI sama-sama ingin menghilangkan tindak diskriminasi dan kolonialisme. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan oleh MILF selama ini. Mengecam tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. OKI sendiri merupakan suatu organisasi yang sangat mengecam tindakan diskriminasi dan kolonialisme dan berkomitmen untuk menciptakan kedamaian. Adanya persamaan dalam hal identitas dan kepentingan menjadikan MILF dan Al-Qaeda membentuk suatu aliansi untuk dapat mengakhiri konflik dengan pemerintah Filipina. OKI berperan sebagai mediator sekaligus fasilitator sebagai bentuk upaya OKI Dalam menyelesaikan konflik dan membantu MILF untuk dapat melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina.

Tugas OKI sebagai fasilitator yaitu untuk memfasilitasi perundingan antara MILF dan pemerintah Filipina dalam menentukan jalan keluar untuk dapat

mencapai kata damai antara kedua belah pihak (Sandria 2018). Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh OKI sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik antara MILF dan pemerintah Filipina yaitu pembentukan Bangsamoro Coordination Forum (BCF). BCF ini sendiri dibentuk oleh OKI sebagai wadah untuk MILF dalam mengkonsolidasikan Kerjasama terkait upaya perjuangan damai dengan pemerintah Filipina (Sandria 2018). Adapun peran OKI sebagai mediator dalam konflik ini yaitu dengan membantu MILF membuat suatu badan ad hoc yang diberi nama International Contact Group atau ICG.

Keterlibatan Malaysia kedalam konflik ini merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh MILF dalam perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Filipina tahun 2000. Dari segi identitas dan kepentingan, Malaysia tidak berbeda dengan OKI. Hal tersebut dikarenakan Malaysia merupakan salah satu pendiri dan sekjen pertama OKI. Sehingga menjadikan Malaysia memiliki identitas dan kepentingan yang sama dengan OKI dalam konflik MILF dengan pemerintah Filipina. Malaysia lebih cenderung berperan sebagai penengah konflik antara MILF dan Pemerintah Filipina. MILF dan pemerintah Filipina sepakat menunjuk Malaysia sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian konflik antara kedua belah pihak (Thalang 2017).

Salah satu bentuk pencapaian Malaysia sebagai penengah atau mediator dalam upaya penyelesaian konflik antara MILF dan pemerintah Filipina yaitu terwujudnya kesepakatan *Framework of Agreement Bangsamoro* (FAB) pada tahun 2012. Isi dari FAB sendiri yaitu menetapkan Bangsamoro sebagai entitas politik baru yang diberi nama Bangsamoro sebagai pengganti dari ARMM. Kemudian adanya perumusan Undang Undang Dasar Bangsamoro yang akan

dijadikan sebagai dasar hukum bagi Bangsamoro itu sendiri (Tandio, Frasisaka and Priadarsini 2017). Penurunan intensitas konflik antara kedua belah pihak semakin didukung dengan terwujudnya suatu kesepakatan damai yang dikenal dengan nama *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB) pada tahun 2014 (Thalang 2017). Terwujudnya perdamaian yang menandakan intensitas konflik sudah mulai menurun ditandai dengan adanya kerjasama yang terjalin antara MILF dan pemerintah Filipina pada tahun 2017. Kerjasama tersebut yaitu Kerjasama dalam melawan dan menentang kehadiran ISIS di Filipina. MILF dan pemerintah Filipina melakukan Kerjasama untuk melawan dan menentang kehadiran ISIS di Kawasan Filipina (Villamour 2018). Kerjasama tersebut menjadi salah satu bukti bahwa konflik antara MILF dan pemerintah Filipina sudah mulai mereda dan menemukan titik terang.

Tabel 1. Analisis Identitas, Kepentingan dan Tindakan MILF

No	Analisis Identitas, Kepentingan dan Tindakan MILF	
1	Identitas	MILF hadir sebagai salah satu gerakan yang memperjuangkan kepentingan Bangsamoro. Metode perundingan menjadi salah stau identitas yang dibentuk oleh MILF. Gerakan MILF termasuk kedalam identitas kategori sosial. Hal tersebut dikarenakan MILF membutuhkan suatu atribut atau karakteristik yang dapat membedakannya dengan gerakan yang lainnya.

2	Kepentingan	Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Alexander Wendt identitas merupakan prasyarat dari kepentingan suatu aktor. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kepentingan yang dibawa oleh MILF dalam konflik dengan pemerintah Filipina yaitu untuk melakukan perundingan terkait dengan hak-hak Bangsamoro.
3	Tindakan	Pelibatan aktor eksternal oleh MILF kedalam konflik dengan pemerintah Filipina merupakan salah satu bentuk tindakan yang diambil oleh MILF itu sendiri. MILF memandang dengan adanya peran aktor eksternal akan lebih memudahkan MILF dalam melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina. aktor eksternal yang terlibat kedalam konflik yaitu Al-Qaeda, Jama'ah Islamiyah, OKI, dan yang terakhir Malaysia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

MILF didirikan sebagai suatu Gerakan yang menggunakan metode perundingan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro. terbentuknya Gerakan ini akibat adanya rasa ketidakpuasaan Bangsamoro terhadap Gerakan-gerakan sebelumnya yang hanya menggunakan metode jihad (kekerasan) dalam perjuangannya. Metode jihad tersebut dianggap kurang efisien dalam perjuangan Bangsamoro. Hal tersebut dikarenakan metode jihad dipandang sebagai suatu metode yang hanya akan menimbulkan kerugian semata. Sedangkan metode perundingan dianggap sebagai suatu metode yang lebih efisien dari metode jihad. Metode perundingan ditujukan untuk dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Mengingat intensitas konflik antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina telah banyak memakan korban jiwa. MILF menjadikan metode perundingan sebagai suatu identitas yang membedakan antara MILF dengan Gerakan lainnya. Hal tersebut termasuk kedalam identitas kategori sosial, dimana MILF membutuhkan suatu atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan Gerakan yang lain.

Salah satu faktor didirikannya MILF ini oleh Salamat Hasim yaitu karena perbedaan pandangan terkait metode perjuangan antara Salamat Hasim dan Nur Misuari selaku ketua MNLF. Sikap Nur Misuari yang mulai hilang kendali dengan mendeklarasikan jihad terhadap pemerintah Filipina menjadi alasan Salamat Hasyim keluar dari Gerakan MNLF, dan kemudian membentuk Gerakan

sendiri yaitu MILF. Kehadiran MILF menjadikannya sebagai salah satu Gerakan terbesar dan paling berpengaruh yang ada di kawasan Filipina khususnya Mindanao. MILF dianggap sebagai Gerakan yang merepresentasikan hak-hak dan kepentingan Bangsamoro dalam perjuangannya. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu tujuan di dirikannya MILF itu sendiri yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan Bangsamoro yang telah dirampas oleh pemerintah Filipina.

MILF melibatkan beberapa aktor eksternal kedalam konflik dengan pemerintah Filipina. pelibatan aktor eksternal tersebut ditujukan untuk dapat menandingi kekuatan dari pemerintah Filipina itu sendiri. Kebijakan All-Out War yang di keluarkan oleh pemerintah Joseph Estrada memaksa MILF untuk mencari dukungan atau bantuan dari aktor eksternal. Aliansi yang dilakukan oleh MILF dengan aktor eksternal termasuk kedalam role identity atau identitas peran. Hal tersebut dikarenakan masing-masing aktor yang menjalin aliansi dengan MILF dapat mempengaruhi kebijakan MILF itu sendiri. Posisi MILF dapat dilihat tergantung dengan siapa MILF menjalin aliansi.

Identitas merupakan prasyarat dari kepentingan suatu aktor. Definisi tersebut menjelaskan bahwa metode perundingan yang menjadi identitas MILF dapat menentukan kepentingan yang dibawa oleh MILF sendiri. Kepentingan yang dibawa oleh MILF yaitu untuk dapat melakukan suatu perundingan dengan pemerintah Filipina. perundingan tersebut ditujukan untuk dapat menemukan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian konflik yang sudah berkepanjangan antara MILF dengan pemerintah Filipina. pelibatan para aktor eksternal yang dilakukan

oleh MILF dianggap dapat membantu MILF melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina.

Pelibatan aktor eksternal tersebut mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh MILF dalam konflik dengan pemerintah Filipina. Aktor eksternal yang terlibat seperti Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah cenderung lebih mendukung MILF untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina. Keterlibatan dua aktor tersebut tidak terlepas dari kebijakan All-Out War yang dikeluarkan oleh Joseph Estrada. Pemberian dana persenjataan dan pelatihan militer merupakan landasan MILF dalam melakukan aliansi dengan kedua aktor tersebut. Selain itu, persamaan identitas dan kepentingan didalam konflik menjadi alasan terbentuknya kerjasama antara MILF dengan Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah.

MILF juga menjalin aliansi dengan aktor eksternal seperti OKI dan Malaysia. Pelibatan kedua aktor tersebut mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh MILF itu sendiri. OKI dan Malaysia lebih cenderung mendorong MILF untuk dapat melakukan suatu perundingan dengan pemerintah Filipina. hal tersebut dikarenakan peran OKI dan Malaysia didalam Konflik. OKI dan Malaysia berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam upaya penyelesaian konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina. terbentuknya aliansi ini juga didasari oleh adanya kesamaan dalam hal identitas maupun kepentingan masing masing aktor.

Dalam aliansi yang terjalin antara MILF dan Al-Qaeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal identitas dan kepentingan dalam aliansi. Kesamaan identitas antar keduanya yaitu sama-sama ingin menegakkan nilai-nilai dan ajaran

Islam. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kepentingan yang sama antar keduanya yaitu sama-sama ingin memperkuat gerakan satu sama lain. Persamaan dalam hal identitas dan kepentingan tersebut menyebabkan terjalinnya suatu aliansi antar keduanya. Aliansi tersebut saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Al-Qaeda mendapatkan camp pelatihan di Kawasan MILF untuk Latihan militer. Sedangkan MILF mendapat dana dan persenjataan dari Al-Qaeda. Hal tersebut ditujukan untuk memperkuat gerakan satu sama lain sesuai dengan kepentingan dari kedua gerakan itu sendiri.

Kemudian, aliansi yang terjalin antara MILF dan Jama'ah Islamiyah. Aliansi keduanya dilandasi atas dasar persamaan dalam hal identitas dan kepentingan. Dalam hal identitas, keduanya merupakan Gerakan separatis. Sedangkan dalam hal kepentingan, keduanya sama-sama ingin mendirikan negara dan pemerintahan yang berbasis Islam di wilayah masing masing. Aliansi atau Kerjasama yang terjalin antar keduanya yaitu kerjasama dalam bidang militer. MILF memberikan daerah kawasannya untuk dapat dijadikan sebagai tempat Latihan militer oleh Jama'ah Islamiyah. Jama'ah Islamiyah memberikan pelatihan militer terhadap MILF. Pelatihan militer tersebut yaitu pelatihan dalam penggunaan peluncur geranat, mortar, senjata anti-tank, dan *howitzer*.

Selain menjalin aliansi untuk dapat melakukan perlawanan terhadap pemerintah, MILF juga menjalin aliansi untuk dapat melakukan perundingan dengan pemerintah Filipina. aliansi yang terjalin antara MILF dengan OKI dan Malaysia merupakan aliansi yang ditujukan untuk membantu MILF dalam upaya perundingan damai dengan pemerintah Filipina.

Dalam aliansi yang terjalin antara OKI dan Malaysia dengan MILF dilandasi atas dasar identitas dan kepentingan yang sama. Persamaan identitas antara OKI dan Malaysia dengan MILF yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian dari segi kepentingan, mereka sama-sama ingin menghapus tindakan diskriminatif dan kolonialisme. Berlandaskan hal tersebut, ketiga nya menjalin aliansi untuk dapat mencapai kepentingan tersebut. Dalam hal ini OKI dan Malaysia memiliki peran yang sangat besar dalam terciptanya perundingan damai antara MILF dan pemerintah Filipina. Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan menurunnya intensitas konflik antara MILF dengan pemerintah Filipina semenjak MILF menjalin aliansi dengan OKI dan Malaysia. Dalam penyelesaian konflik tersebut, OKI dan Malaysia memiliki peranan masing-masing. OKI sebagai fasilitator dan Malaysia sebagai mediator. Hingga pada tahun 2017, terjalinnya Kerjasama antara MILF dan pemerintah Filipina dalam melawan dan menentang kehadiran ISIS di Filipina. Kerjasama tersebut menandakan konflik sudah mulai mereda antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zulfikar. 2019. *Osama Bin Laden: Delapan tahun setelah kematiannya, dimana al-Qaeda*. 6 MEI. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48173939>.
- Armandhanu, Denny. 2014. *Jejak Hubungan Abu-Sayyaf-Jemaah Islamiyah*. 17 Oktober. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141017153800-106-6737/jejak-hubungan-abu-sayyaf-jemaah-islamiyah>.
- Atkinson, G. 2012. *Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman*. American Security Project, Perspective.
- Azhar, Muhammad. 2002. "Menenal Dari Dekat : Organisasi Konferensi Islam (OKI)." *Jurnal Tarjih*.
- Bale, Jeffrey M. 2015. "The Abu Sayyaf Group in Its Philippine and International Contexts."
- Berutu, Ali Geno. 2019. "Sea Muslim Minoritas : South Thailand/Pattani, South Philippines/Mindanao and Thailand." *Islamic Management and Empowerment Journal* 9.
- Creswell, Jhon W. 1994. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Dewinta, Tiara Ayu. 2016. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013." *Journal of International Relations*.
- Firmanzah. 2017. "Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Moro di Filipina Selatan : Studi Terhadap Moro National Liberation Front (1971-1996)." *Intelektual* 32-33.
- Fuad, Noor Azharul. 2016. "The Decline of Terrorist Group: Penyebab Menurunnya aksi teroris kelompok al-qaeda tahun 2009-2013." *journal of international relations*.
- Gershman, Jhon. 2003. *Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina"dalam Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, ed. Moeflich Hasbullah. Bandung: Fokusmedia.
- Hasaruddin. 2019. "Perkembangan Sosial Islam di Filipina ." *Pendidikan Sosial dan Budaya* 62.

- Hasni, Yasmina. 2011. *Indonesia Kirim Tim untuk IMT di Filipina*. Maret.
<https://republika.co.id/berita/168001/indonesia-kirim-tim-untuk-imt-di-filipina>.
- Islam, Syeid sirajul. 2005. *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*.
 Singapore: Thomson Learning.
- Istiqomah, Heny. 2014. "Peran International Contact Group dalam Mediasi Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front Tahun 2009-2012."
- Larasati, Adisty. 2015. "Kerjasama Keamanan Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011." *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Muslim, Global. 2011. *Siapa Radikal, Siapa Teroris?: Pembantaian Muslim ASEAN Yang Tak Kunjung Usai*. 5.
<https://www.globalmuslim.web.id/2011/05/siapa-radikal-siapa-teroris-pembantaian.html?m=0>.
- Nasir, Muhammad. 2019. "Dinamika Islam di Filipina." *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 72-73.
- Rafiq, Aunur. 2017. "Kebijakan Pemerintah Filipina Dalam Menangani Ancaman Gerakan Moro Islamic Liberation Front." *Journal of International Relations*.
- Rosyidin, Mohamad. 2014. "Politik Identitas dalam Hubungan Internasional: Bias Konstruksi Barat terhadap Ancaman Uji Coba Rudal Korea Utara dan India ." *Jurnal Transformasi Global* 149-150.
- Rouiller, Jean-Paul. 2002. *Transnational Violence and Seams of Lawlessness in the Asia-Pasific: Lingage to Global Terrorism*. Hawaii: Asia Pasific Center for Security Studies.
- Safrudin, Rusli. 2013. "Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme : Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)." *Jurnal Pertahanan*.
- Samosir, Hanna Azarya. 2016. *Siapa yang Bertarung di Selatan Filipina*. 13 1.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160112151747-106-103767/siapa-yang-bertarung-di-selatan-filipina>.
- Sandria, Ade Fitra. 2018. "UPAYA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI KONFLIK MORO FILIPINA SELATAN 2015-2017." *NASKAH PUBLIKASI* 3-4.

- Susetyo, Heru. 2009. *The Journal of a Muslim Travler : sebuah jurnal perjalanan melintasi Asia, Amerika, Eropa, & Australia*. Bandung : Mizan Publika.
- Tandio, Yolanda, Idin Frasisaka, and Ni Wayan Rainy Priadarsini. 2017. “Faktor Pendorong Moro Islamic Liberation Front (MILF) Untuk Menandatangani Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) Dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012.” *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Taya, Shamsuddin L. 2007. “The Political Strategies of the Moro Islamic Liberation Front for Self-Determination in the Philippines.” *Intellectual Discourse*.
- Thalang, Chanintira na. 2017. *Malaysia: Southeast Asian Peacemaker?* 18 April. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/malaysia-peacemaker/>.
- UCA. 2021. *Philippines / Moro Islamic Liberation Front (1997-present)*. <https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/philippinesmoro-islamic-liberation-front-1978-present/>.
- Villamour, Felipe. 2018. *Philipines Agents Kill Militants Who Helped Fight ISIS-Linkend Forces*. 28 May . <https://www.nytimes.com/2018/05/28/world/asia/philippines-kill-milf-militants.html>.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson Jr., Thomas G. 2009. “Extending the Autonomous Region in Muslim Mindanao to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace.”